



**SALINAN**

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2022-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2046;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5514);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 012022);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN*  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2022-2046.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.

BAB II...

## BAB II PELAKSANAAN GDPK

### Pasal 2

(1) GDPK Tahun 2022-2046 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN KEPENDUDUKAN NASIONAL
- BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
- BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
- BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
- BAB VI *ROAD MAP*
- BAB VII PENUTUP

(2) GDPK Tahun 2022-2046 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENDANAAN

### Pasal 3

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV...

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.  
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG *GRAND DESIGN*  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2022 - 2046

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi karena penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Sebaliknya, aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variabel yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan yang selanjutnya disebut dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Bappeda bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Banten dan perangkat daerah terkait, pada tahun 2021 akan menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2046, yang merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Tangerang.

Kondisi yang diinginkan adalah penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan, dimana tingkat fertilitas, mortalitas semakin menurun, dan persebaran lebih merata. Dalam hal fertilitas adalah tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2026 dan terus berlanjut hingga tahun 2046. Untuk mencapai Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) 2,1 per wanita atau net reproduction (NRR) sebesar 1 per wanita pada tahun 2026. Kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan lebih mudah dicapai apabila anak pada keluarga inti jumlahnya ideal, yaitu “dua anak cukup”, dengan cara mengatur jarakkelahiran dan jumlah anak.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dirumuskannya GDPK ini, yaitu “Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun



daya tampung lingkungan, termasuk kondisi perkembangan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendukung visi pemerintahan Kabupaten Tangerang”. Sedangkan, tujuan khusus terdiri, dari:

1. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
2. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan sosial komprehensif.
3. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk.
4. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga.
5. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan.
6. Sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor.

Adapun sasaran dari penyusunan GDPK ini, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Tangerang berbasis kependudukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan
  2. Tercapainya keberhasilan pemanfaatan bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas
  3. Terwujudnya database kependudukan dan pencatatan sipil yang presisi dan terintegrasi lintas sektor
- 1.3. Pengertian, Kedudukan, Ruang Lingkup dan Pendekatan Pembangunan GDPK

#### 1.3.1. Batasan Pengertian

Mengutip secara langsung dari buku Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020), berikut beberapa Batasan pengertian dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang tahun 2022-2046, yaitu:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
3. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.

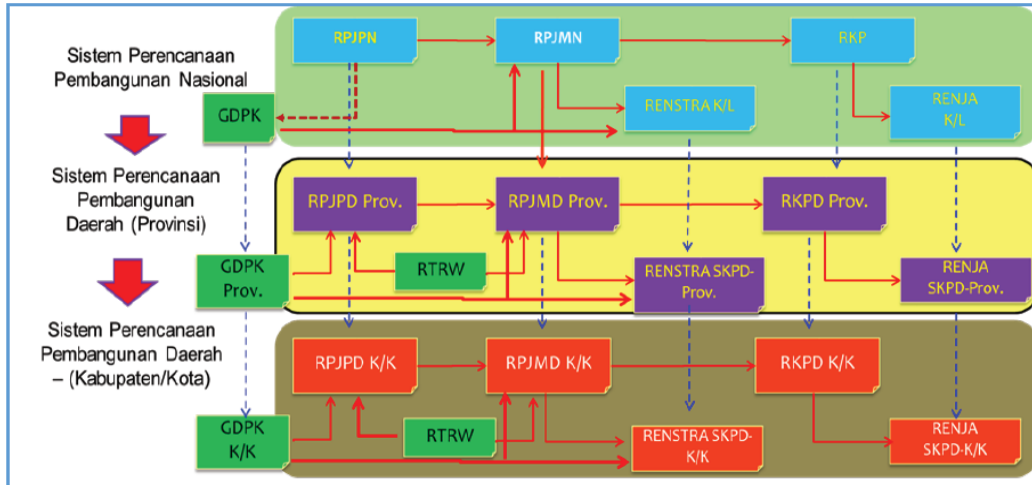
4. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antar jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
22. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
23. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
24. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
25. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
26. *Roadmap* merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

### 1.3.2. Kedudukan GDPK

Berdasarkan buku Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020), GDPK merupakan kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran di bidang pembangunan yang memuat 5 pilar pembangunan serta merupakan penajaman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD).



Sumber: Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020)

Gambar 1.1. kedudukan GDPK dalam sistem perencanaan pembangunan

### 1.3.3. Ruang Lingkup GDPK

Ruang lingkup *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang tahun 2022-2046 meliputi analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan untuk melihat kondisi kependudukan terkini. Selain itu, GDPK ini juga meliputi proyeksi kependudukan, visi dan misi pembangunan kependudukan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta *roadmap* pembangunan kependudukan yang akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyusun dokumen kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan kependudukan selama 25 tahun ke depan.

### 1.3.4. Pendekatan Penyusunan GDPK

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang tahun 2022-2046 diawali dengan melakukan kajian dokumen kebijakan, kajian program unggulan, kajian akademik dan pelaksanaan program di bidang kependudukan. Setelah itu, memproyeksikan kondisi kependudukan 25 tahun ke depan serta menyusun visi, misi, strategi, arah kebijakan dan *roadmap* pembangunan kependudukan untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan kependudukan 25 tahun ke depan. Semua tahapan tersebut dilakukan melalui diskusi/konsultasi/*Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak terkait.

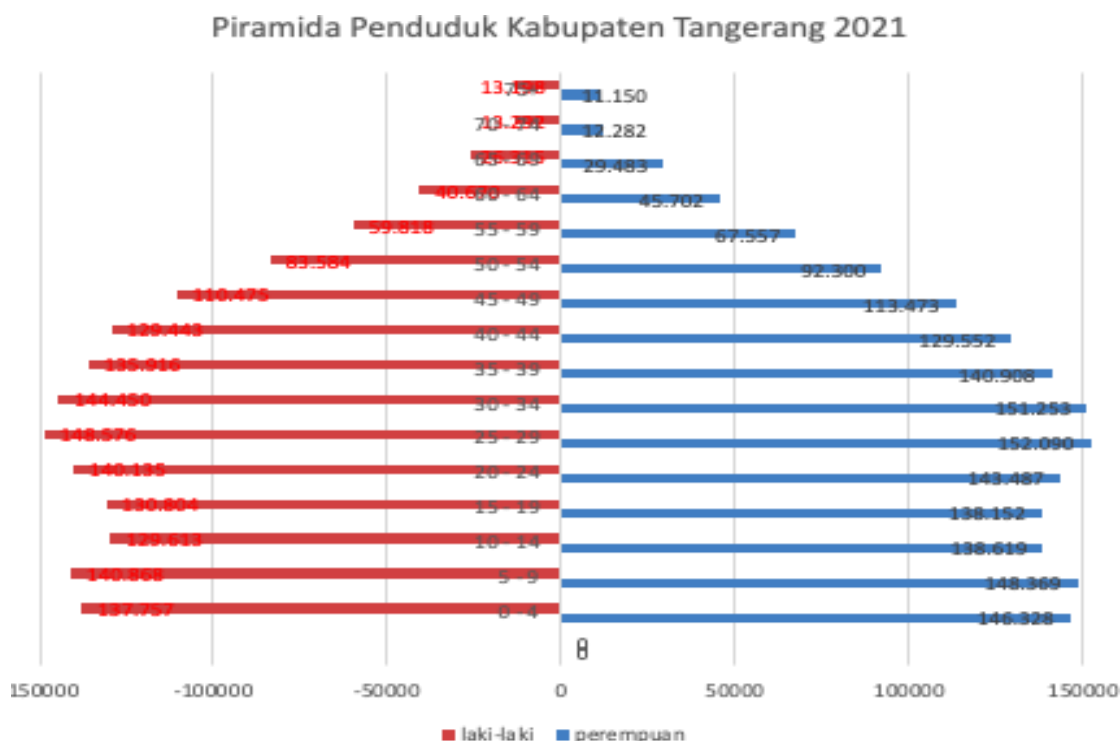
## BAB II. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

### 2.1. Analisis Situasi Kependudukan

Analisis situasi kependudukan dilihat berdasarkan aspek 5 pilar pembangunan kependudukan, yaitu: kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kondisi keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk serta data dan informasi kependudukan.

#### 2.1.1. Kuantitas Penduduk

Berdasarkan BPS Kabupaten Tangerang (2021) jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sebanyak 3.245.619 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Pasarkemis yaitu sebanyak 273.659 jiwa. Sedangkan, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk 41.329 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019- 2020 di Kabupaten Tangerang sebesar 1,26%. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di wilayah Provinsi Banten.



Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka (2021)

Gambar 2.1. Piramida penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2021

Jika dilihat dari struktur kependudukan Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 (Gambar 2.1), terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok usia 25- 34 tahun yaitu pada usia produktif. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Tangerang untuk dapat mengelola kelompok produktif tersebut agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian khususnya ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang. Jika tidak, maka tingkat pengangguran yang tinggi justru akan menjadi beban ekonomi bagi Kabupaten Tangerang.

Kelompok usia tertinggi kedua berada pada usia 0-9 tahun. Artinya, tingkat kelahiran di Kabupaten Tangerang masih sangat tinggi dengan kondisi kesehatan yang semakin baik sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi.

### 2.1.2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk dapat dilihat dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi (pendapatan dan ketenagakerjaan). Status gizi balita menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan penduduk. Berdasarkan data status gizi balita (Tabel 2.1), terlihat bahwa status gizi baik pada balita semakin baik di antara tahun 2016- 2018. Persentase gizi buruk dan gizi kurang juga semakin menurun. Namun, berdasarkan LKIP Kabupaten Tangerang tahun 2021, jumlah balita gizi buruk meningkat menjadi 1,4%. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan pada akhirnya berdampak pada status gizi balita di keluarga tersebut.

Tabel 2.1. Status gizi balita di Kabupaten Tangerang tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Balita							%
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	
2016	1.16	0,41	8,935	3,17	268.34	95,32	2,880	1,03
2017	1.16	0,38	9,644	3,14	294.03	95,68	2,479	0,81
2018	1,040	0,33	7,863	2,51	296.09	94,66	2,134	0,68

Sumber: Bappeda Kab. Tangerang (2020)

Pada tahun 2019, persentase balita gizi kurang meningkat menjadi 7,4%. Kemudian, menurun lagi di tahun 2020 menjadi 3,9% (Diskominfo Kab. Tangerang 2021). Hal ini terjadi seiring dengan adanya pandemi covid.

Selain status gizi balita, derajat kesehatan penduduk juga dapat

dilihat dari angka harapan hidup (AHH) yang menggambarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang penduduk sejak lahir. Berdasarkan BPS Kab. Tangerang (2021), AHH Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sebesar 69,79 tahun dan meningkat di tahun 2020 mencapai 69,89 tahun. Angka ini masih berada di bawah AHH Provinsi Banten namun lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Banten. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (2020), jumlah kematian ibu sebanyak 39 ibu dengan angka kematian ibu (AKI) sebesar 49 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan, jumlah bayi mati sebanyak 14 bayi dengan angka kematian bayi (AKB) sebesar 0,2 per

1.000 kelahiran hidup. Angka ini sudah mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kualitas dan fasilitas kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan serta meningkatnya pengetahuan kesehatan pada masyarakat.

Pada dimensi pendidikan, kualitas penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (APS) serta angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal sejak sekolah dasar hingga tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Berdasarkan BPS Kabupaten Tangerang (2021) rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2017-2020 yaitu 8,24 tahun hingga 8,39 tahun. Artinya Sebagian besar penduduk usia sekolah memutuskan untuk berhenti sekolah saat kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tangerang (2021), terlihat bahwa APS untuk usia SLTP dan SLTA mengalami penurunan sejak tahun 2018 untuk SLTA dan sejak tahun 2019 untuk usia SLTP. Sedangkan secara menyeluruh, APS tertinggi berada pada usia SD (Tabel 2.2). Penurunan APS tersebut dapat terjadi karena tingkat ekonomi keluarga maupun dari sisi motivasi para pelajar untuk melanjutkan sekolah. Penyebab penurunan tersebut juga perlu dikaji lebih mendalam.

Tabel 2.2. Angka partisipasi sekolah Kabupaten Tangerang

Usia	2017	2018	2019	2020
SD (7-12 th)	99,56	99,76	99,80	99,86
SLTP (13-15 th)	95,36	95,81	95,49	94,99
SLTA (16-18 th)	72,32	68,73	67,50	67,78

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2021)

Tabel 2.3. Persentase penduduk melek huruf Kabupaten Tangerang

tahun 2019-2020 (%)

Kelompok umur	2019	2020
15-19	99,88	100
20-24	100	100
25-29	100	100
30-34	100	100
35-39	99,97	100
40-44	100	100
45-49	99,06	96,66
50+	86,41	89,22
Total 15+	97,38	97,62

*Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2021)*

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan membaca penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS Kab. Tangerang 2021 (Tabel 2.3), terlihat bahwa hingga tahun 2020, angka melek huruf sudah hampir mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Tangerang sudah semakin baik.

Jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Kabupaten Tangerang sejak tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan yaitu 70,97 hingga 71,92. Dengan angka ini, pembangunan manusia Kabupaten Tangerang masih berada pada peringkat lima di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Pada dimensi ekonomi, kualitas penduduk dapat dilihat dari status kemiskinan. Miskin didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuanseseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. BPS Provinsi Banten (2021) menunjukkan bahwa penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar 242.020 jiwa dengan angka pertumbuhan tiap tahun seperti pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang tahun 2013-2020

Tahun	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2013	183,89	
2014	173,10	-5,9
2015	191,12	10,4
2016	182,52	-4,5
2017	191,62	5,0
2018	190,05	-0,8
2019	193,97	2,1
2020	242,02	24,8

*Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2021)*

Jumlah penduduk miskin sempat berkurang pada tahun 2014, 2016 dan 2018. Kemudian, melonjak tinggi pada tahun 2020 seiring



dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak penduduk kehilangan pekerjaan yang berlanjut dengan menurunnya/hilangnya pendapatan sehingga daya beli semakin menurun dan kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi.

Tabel 2.5 Statistik ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang

Indikator	2019	2020
Bekerja (juta orang)	1,67	1,59
Pengangguran (juta orang)	0,16	0,23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,6	65,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,9	13,0

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2021)

Secara lebih mandalam, kualitas penduduk dalam dimensi ekonomi juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan (Tabel 2.5). Tabel X tersebut menunjukkan bahwa kualitas penduduk dalam dimensi ekonomi cenderung menurun terutama saat terjadi pandemi Covid-19.

### 2.1.3. Kondisi Keluarga

Kondisi keluarga merupakan gambaran kemampuan keluarga di Kabupaten Tangerang untuk memenuhi peran dan fungsi keluarga secara optimal baik fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan. Kondisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya menjadi gambaran bahwa sebagian besar keluarga di Kabupaten Tangerang belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan nasional tahun 2011- 2035, terdapat beberapa dampak dari tidak berfungsinya peran keluarga secara optimal baik dari sisi internal maupun eksternal sebagai berikut.

#### a. Dampak di internal keluarga

##### 1. Penyikapan terhadap pola berkeluarga

Sebagian keluarga belum memahami pola keluarga yang ideal sehingga ketidakpahaman ini menghambat implementasi pola keluarga ideal.

##### 2. Pemenuhan hak dasar keluarga

Pemenuhan hak dasar keluarga, seperti partisipasi dalam pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan, perumahan, dan sosial, belum sepenuhnya tercapai.

##### 3. Berkaitan dengan ketahanan keluarga

- Rendahnya tingkat partisipasi keluarga terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Adanya konflik antarkelompok di beberapa daerah

- Rendahnya partisipasi keluarga untuk terlibat dalam kegiatan organisasi di masyarakat
- Rendahnya kemampuan keluarga dalam memelihara kearifan lokal dan dalam mengelola sumber daya

b. Dampak di eksternal keluarga

1. Daya dukung lingkungan

Pertambahan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, seperti beralih fungsinya lahan produktif (sawah dan perkebunan) untuk permukiman dan makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Penduduk yang bertambah *mengakibatkan* mobilitas yang tinggi dan meningkatkan jumlah alat transportasi. Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang akan berpengaruh pada gangguan kesehatan. Pertambahan penduduk meningkatkan jumlah limbah rumah tangga/industri dan sampah sehingga meningkatkan pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan.

2. Penyikapan terhadap program yang prokeluarga.

Kebijakan dan program pendukung kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terintegrasi dan terkoordinasi.

2.1.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persoalan mobilitas dan persebaran penduduk yang tidak merata masih menjadi masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah tujuan migrasi. Selain persoalan kepadatan penduduk, migrasi yang tidak terarah dapat menimbulkan masalah sosial seperti daya saing penduduk lokal yang rendah sehingga kalah saing dengan pendatang dalam memperoleh kesempatan bekerja. Sebaliknya, jika pendatang memiliki keahlian yang rendah, maka akan menjadi beban penduduk miskin atau pengangguran di daerah tujuan migrasi.

Tabel 2.6 Jumlah penduduk pindah datang dan keluar Kabupaten Tangerang tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH WARGA PINDAH DATANG			JUMLAH WARGA PINDAH KELUAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	JANUARI	1,456	1,489	2,979	1303	1255	2547
2	FEBRUARI	1,150	1,145	3,084	1178	1059	2237
3	MARET	959	1,066	3,076	915	866	1791
4	APRIL	273	275	2,573	415	357	778
5	MEI	420	366	2,239	244	220	464
6	JUNI	1,093	1,183	2,423	893	897	1799
7	JULI	929	925	4,446	579	581	1159
8	AGUSTUS	1,120	1,071	3,299	375	366	731
9	SEPTEMBER	1,569	1,529	3,107	441	477	918
10	OKTOBER	1,084	1,142	3,350	523	495	1006
11	NOVEMBER	1,456	1,489	2,667	531	508	1039
12	DESEMBER	1,054	1,078	2,132	328	256	584
<b>JUMLAH TAHUN 2020</b>		<b>12,563</b>	<b>12,758</b>	<b>35,375</b>	<b>7,725</b>	<b>7,337</b>	<b>15,053</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2020)

Berdasarkan data pindah datang dan keluar Kabupaten Tangerang tahun 2020 (Tabel 2.6), terlihat bahwa jumlah warga yang datang ke Kabupaten Tangerang jauh lebih banyak dibandingkan warga yang pindah keluar. Hal ini dapat terjadi karena Kabupaten Tangerang memiliki faktor penarik yang kuat berupa lapangan kerja terutama dari sektor industri sehingga banyak penduduk luar yang ingin mencari pekerjaan di Kabupaten Tangerang.

Untuk menghindari munculnya dampak negatif dari migrasi yang tidak terarah, maka pemerintah Kabupaten Tangerang perlu membuat kebijakan yang mengatur persoalan migrasi secara spesifik. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja baru harus dilakukan secara merata agar migrasi terjadi secara merata.

#### 2.1.5. Data dan Informasi Kependudukan

Dalam rangkaian pembangunan penduduk, persoalan data dan informasi merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan karena data tersebut menjadi landasan dalam penyusunan berbagai kebijakan agar tepat sasaran dan tepat guna.

Tabel 2.7 Jumlah penduduk wajib memiliki e-ktp namun belum memilikinya

KECAMATAN	Jumlah penduduk wajib memiliki E-KTP namun belum memiliki		
	2018	2019	2020
01-BALARAJA	7.332	9.327	9.436
02-JAYANTI	3.304	4.733	5.358
03-TIGARAKSA	11.556	14.576	14.693
04-JAMBE	2.557	3.738	3.705

KECAMATAN	Jumlah penduduk wajib memiliki E-KTP namun belum memiliki		
	2018	2019	2020
05-CISOKA	6.208	8.374	8.651
06-KRESEK	4.549	6.039	5.767
07-KRONJO	5.270	6.711	6.491
08-MAUK	4.720	6.170	6.212
09-KEMIRI	2.818	4.173	4.112
10-SUKADIRI	4.043	5.433	4.964
11-RAJEG	11.208	16.059	17.600
12-PASAR KEMIS	18.284	24.413	22.342
13-TELUKNAGA	9.044	13.466	15.013
14-KOSAMBI	7.746	9.891	10.158
15-PAKUHAJI	7.848	11.269	10.943
16-SEPATAN	6.528	9.633	9.437
17-CURUG	14.041	17.401	17.135
18-CIKUPA	12.703	15.461	14.578
19-PANONGAN	6.777	9.842	9.463
20-LEGOK	7.159	10.053	10.184
21-PAGEDANGAN	6.265	8.968	9.816
22-CISAUK	6.000	8.529	8.250
23-SUKAMULYA	3.222	4.540	4.627
24-KELAPA DUA	11.666	15.228	15.316
25-SINDANG JAYA	5.768	7.857	7.649
26-SEPATAN TIMUR	5.404	8.262	9.166
27-SOLEAR	5.713	8.467	8.634
28-GUNUNG KALER	3.097	4.559	4.711
29-MEKAR BARU	2.083	3.401	3.862
JUMLAH	202.913	276.573	278.273

*Sumber: Data sektoral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2020)*

Berdasarkan data kepemilikan e-KTP pada Tabel 2.7 di atas, terlihat bahwa penduduk berusia 17 tahun (wajib memiliki e-KTP) yang belum memiliki e-KTP sejak tahun 2018-2020 semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan pertambahan penduduk usia 17 tahun tidak sebanding dengan kecepatan pembuatan e-KTP. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki e-KTP dan surat kependudukan lainnya. Hal ini perlu diatasi dengan percepatan digitalisasi dalam proses administrasi dan pencatatan kependudukan untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya memiliki surat/ dokumen kependudukan juga harus dilakukan secara merata dan menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran penduduk Kabupaten Tangerang.

Di samping data tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sudah menerapkan prinsip *single ID*

untuk mencegah adanya data lebih dari satu untuk penduduk yang sama.

## 2.2. Kajian Dokumen Kebijakan Nasional dan Daerah

Dalam rangka mencapai visi misi pembangunan nasional, penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) tentu harus merujuk pada peraturan- peraturan yang telah ada baik pada level nasional maupun daerah agar pembangunan yang direncanakan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Penyusunan GDPK Nasional tahun 2011-2035 didasarkan pada beberapa peraturan yaitu<sup>1</sup>:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
  
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
15. Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>1</sup> Dikutip dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2012

16. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
18. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
19. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
21. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
22. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
23. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
24. Undang-Undang No. 35 tahun 2010 tentang Narkotika
25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
26. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
27. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
28. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
29. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
  
30. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan

Berdasarkan Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang disusun oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2020, GDPK merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang mengacu pada RPJPN dan digunakan sebagai acuan bagi RPJMN atau RPJMD dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahunan ke depan. Namun, RPJMN atau RPJMD periode tahun sebelumnya juga dapat menjadi kajian kebijakan untuk mengidentifikasi pembangunan bidang kependudukan yang telah dilakukan dan yang perlu dilakukan untuk keberlanjutan program pembangunan kependudukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan

GDPK Kabupaten Tangerang tahun 2022-2046, selain merujuk pada GDPK Nasional 2011-2035, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, penyusunan GDPK Kabupaten Tangerang didasarkan pada beberapa kebijakan sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 12 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang 2005-2025
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Mengacu pada *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional 2011-2035, terdapat lima pilar pembangunan kependudukan yaitu: (1) Pengendalian kuantitas penduduk, (2) Peningkatan kualitas penduduk, (3) Pembangunan keluarga berkualitas, (4) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dan (5) Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan. Selain itu, terdapat juga pokok-pokok pembangunan kependudukan berdasarkan lima pilar pembangunan kependudukan yang dapat dijadikan acuan dalam Menyusun GDPK tingkat kabupaten. Pokok-pokok pembangunan kependudukan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk, dilakukan melalui dua bagian utama, yaitu:
  - 1.1. Pengaturan Fertilitas
  - 1.2. Penurunan MortalitasPengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu:
  - Intergrasi yaitu implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi.
  - Desentralisasi berupa memberikan otoritas yang lebih besar kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program KB, melakukan pemberdayaan SDM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka *capacity building*, memperkuat komitmen politik, khususnya di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB,

memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB di tingkat kabupaten/kota dan mendelegasikan kewenangan operasional di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan otoritas yang lebih besar pada kabupaten/kota dalam rangka mengembangkan program dan melaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah

- Kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil
  - Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional
  - Fokus kepada masyarakat miskin dengan memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB
2. Peningkatan Kualitas Penduduk dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu:
- 2.1. Dimensi Kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal melalui beberapa strategi, yaitu: melakukan pencegahan dan perawatan penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak, pencegahan dan perawatan penyakit kronis dan degeneratif serta penyakit lain sesuai kondisi daerah
  - 2.2. Dimensi Pendidikan dilakukan dengan cara memberikan akses yang besar terutama bagi kelompok rentan untuk memperoleh pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, pembangunan perlu diarahkan juga pada penurunan ketimpangan gender
  - 2.3. Dimensi Ekonomi dilakukan dengan memperluas akses ke pasar kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan
3. Pembangunan Keluarga yang memiliki pokok-pokok kegiatan meliputi kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah, membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Strategi yang dilakukan dalam rangka pembangunan keluarga yaitu:
- Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal
  - Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
  - Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
  - Komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui



- perkawinan antara laki-laki dan perempuan
- Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
  - Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
  - Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal
  - Konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga
  - Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
  - Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
  - Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga
  - Pendidikan, pembinaan dan penyuluhan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga
4. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk yang memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuan, yaitu:
- Mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk
  - Mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, seperti Jakarta dan supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, dengan adanya penataan wilayah penyangga untuk mengembangkan daerah tujuan transmigrasi yang secara khusus diintegrasikan dengan kota besar sekitarnya.
- Untuk mencapai tujuan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, terdapat beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk dilaksanakan, yaitu:
- Penataan dan penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antarnegara
  - Kebijakan mobilitas penduduk nonpermanen
  - Penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah
  - Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga
  - Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan
  - Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk
  - Peraturan daerah tentang kebijakan mobilitas penduduk

5. Pembangunan *Database* Kependudukan yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

- Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
- Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis
- Pemantapan fungsi dan peranan *Database*
- Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan
- Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai Lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada
- Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (*Decision Support System*) yang terintegratif

2.2.1. Identifikasi Kebijakan Kependudukan Nasional dan Kewilayahan  
 Kebijakan pada level daerah harus searah dan sejalan dengan arahan kebijakan pada level nasional. Berdasarkan identifikasi visi dan misi RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD, terlihat bahwa terdapat keterkaitan dan keselarasan antar dokumen kebijakan tersebut.

Tabel 2.8 Keterkaitan Misi RPJP Nasional 2005-2025, RPJPD Provinsi Banten dan RPJPD Kabupaten Tangerang Mengenai Pembangunan Kependudukan

RPJPD Kabupaten Tangerang	RPJPD Provinsi Banten	RPJP Nasional 2005-2025
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia	Mewujudkan Masyarakat Sejahterayang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya , dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila</li> <li>• Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing</li> </ul>
Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Mewujudkan Penyelenggaraa n Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

RPJPD Kabupaten Tangerang	RPJPD Provinsi Banten	RPJP Nasional 2005-2025
	Berwibawa	

Misi yang dapat menjadi landasan kebijakan pembangunan kependudukan tercantum pada Misi RPJPD Kabupaten Tangerang poin 1, 3 dan 5 dan memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPN 2005-2025 dan Misi RPJPD Provinsi Banten<sup>2</sup>.

Misi RPJPD Kabupaten Tangerang poin 1 berbunyi *“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia”* menekankan pembangunan kependudukan pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas sejalan dengan Misi RPJPN 2005-2025 poin 1 yang berbunyi *“Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”*, poin 2 yang berbunyi *“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”* dan Misi RPJPD Provinsi Banten poin 1 yang berbunyi *“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas”*.

Misi RPJPD Kabupaten Tangerang poin 3 berbunyi *“Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional”* menekankan pembangunan kependudukan pilar peningkatan kualitas penduduk serta penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan Misi RPJPN 2005-2025 poin 3 yang berbunyi *“Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan”* dan Misi RPJPD Provinsi Banten poin 2 yang berbunyi *“Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan”*.

Misi RPJPD Kabupaten Tangerang poin 5 berbunyi *“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif”* menekankan pembangunan kependudukan pada pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan sejalan dengan Misi RPJPN 2005-2025 poin 5 yang berbunyi *“Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum”* dan Misi RPJPD Provinsi Banten poin 4 yang berbunyi *“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”*.

Berdasarkan hasil identifikasi RPJMD Kabupaten Tangerang

---

<sup>2</sup> Dinarasikan dari dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 halaman 305

2019-2023, terdapat 4 dari 6 misi yang dapat dijadikan landasan kebijakan program pembangunan kependudukan yaitu poin 1, 2, 4 dan 5. Selain keterkaitan antar RPJPD, Misi RPJMD Kabupaten Tangerang juga memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025, Misi RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Misi RPJM Nasional 2020-2024 sebagai berikut<sup>3</sup>.

Misi RPJMD Kabupaten Tangerang poin 1 berbunyi “Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious” dan poin 2 berbunyi “Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat” menekankan pembangunan kependudukan pada pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas sejalan dengan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang poin 1 dan 3 yang berbunyi “Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia” dan “Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional”. Selain itu, juga sejalan dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 poin 3 dan 4 yang berbunyi “Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas” dan “Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas” serta RPJMN 2020-2024 poin 1 yang berbunyi “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”.

Tabel 2.9 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025, RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan RPJMN 2020- 2024 Mengenai Pembangunan Kependudukan

RPJPD Kabupaten Tangerang	RPJPD Provinsi Banten	RPJP Nasional 2005-2025
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila</li> <li>• Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing</li> </ul>
Mewujudkan pelayanan dasar	Mewujudkan Perekonomian	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan

<sup>3</sup> Dinarasikan dari dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 halaman 320-322 dengan beberapa penyesuaian

bagi masyarakat secara merata dan proporsional	yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	berkeadilan
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

Misi RPJMD Kabupaten Tangerang poin 4 yang berbunyi *“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”* menekankan pembangunan kependudukan pada pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan sejalan dengan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang 2005- 2025 poin 4 yang berbunyi *“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif”*, Misi RPJMD Prov. Banten 2017-2022 poin 1 yang berbunyi *“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”* dan Misi RPJMN 2020-2024 poin 6 dan 8 yang berbunyi *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”* dan *“Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”*.

Misi RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 poin 5 yang berbunyi *“Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah”* menekankan pembangunan kependudukan pada pilar penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang poin 5 yang berbunyi *“Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”*, Misi RPJMD prov. Banten 2017- 2022 poin 2 yang berbunyi *“Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur”* serta Misi RPJMN 2020-2024 poin 3 yang berbunyi *“Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”*.

### 2.2.2. Identifikasi Sasaran Kebijakan Kependudukan Kewilayahan

Selain keselarasan visi misi antar kebijakan level nasional maupun daerah, sasaran setiap kebijakan pun harus memiliki keselarasan demi mencapai keberhasilan program pembangunan. Keselarasan sasaran kebijakan pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2025, RPJP Prov. Banten 2005-2025, RPJP Kab. Tangerang 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Prov Banten 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10. Sasaran Kebijakan Pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2025, RPJP Prov. Banten 2005-2025, RPJP Kab.Tangerang 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Prov Banten 2017-2022

Pilar Pembangunan Kependudukan	RPJPN 2005-2025	RPJP Prov. Banten 2005-2025	RPJP Kab. Tangerang 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Banten 2017-2022*
1. Pengendalian kuantitas penduduk 2. Peningkatan kualitas penduduk 3. Pembangunan keluarga berkualitas	Sasaran 2: Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	Sasaran dari Misi 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>• Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan daya saing taraf pendidikan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>• Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> <li>• Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> <li>• Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha</li> <li>• Menurunnya tingkat</li> </ul>	Sasaran 1: Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan</li> <li>• Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</li> <li>• Terpenuhiya layanan dasar</li> <li>• Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda</li> <li>• Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing</li> <li>• Meningkatnya kualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus</li> <li>• Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</li> <li>• Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat</li> <li>• Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)</li> <li>• Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus</li> <li>• Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olahraga yang berprestasi</li> <li>• Meningkatnya</li> </ul>

Pilar Pembangunan Kependudukan	RPJPN 2005-2025	RPJP Prov. Banten 2005-2025	RPJP Kab. Tangerang 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Banten 2017-2022*
		<p>pengangguran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Meningkatnya perlindungan tenaga kerja</li> <li>• Meningkatnya kesejahteraan hidup dan terbangunnya kemandirian transmigran</li> <li>• Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dan desa</li> <li>• Terkendalinya pertumbuhan penduduk</li> <li>• Meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan</li> <li>• Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga</li> </ul>		<p>kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa</li> <li>• Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif</li> </ul>	<p>Pengarustamaan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas</li> <li>• Menurunnya PMKS</li> <li>• Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas</li> </ul>
4. Penataan persebaran dan	Sasaran 5: Terwujudnya pembanguna	Sasaran dari Misi 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya investasi daerah</li> </ul>	Sasaran 3: Terwujudnya pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya penyediaan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah</li> </ul>

Pilar Pembangunan Kependudukan	RPJPN 2005-2025	RPJP Prov. Banten 2005-2025	RPJP Kab. Tangerang 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Banten 2017-2022*
<p>pengarahan mobilitas penduduk</p>	<p>n yang lebih merata dan berkeadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat perkotaan dan perdesaan</li> <li>• Meningkatnya pelayanan sistem transportasi</li> <li>• Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air</li> <li>• Meningkatnya pelayanan drainase</li> <li>• Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir</li> <li>• Meningkatnya pelayanan air bersih</li> <li>• Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah</li> <li>• Meningkatnya pelayanan energi dan listrik</li> <li>• Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan</li> </ul>	<p>dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional</p>	<p>layanan dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya konektivitas wilayah</li> <li>• Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien</li> <li>• Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal</li> <li>• Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional</li> <li>• Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>• Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas</li> <li>• Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan</li> </ul>



Pilar Pembangunan Kependudukan	RPJPN 2005-2025	RPJP Prov. Banten 2005-2025	RPJP Kab. Tangerang 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Banten 2017-2022*
		terjangkau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya kawasan kumuh</li> </ul>			Komunikasi yang Memadai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Daya Saing Daerah</li> <li>• Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas</li> <li>• Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja</li> </ul>
5. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan	<i>(Termasuk di sasaran 2)</i>	Sasaran dari Misi 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK</li> <li>• Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah</li> <li>• Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat</li> <li>• Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan</li> </ul>	Sasaran 4: Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	(Termasuk ke dalam sasaran " <i>Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan</i> ")	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien</li> <li>• Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel</li> </ul>

*\*) Ket: setelah perubahan*

Berdasarkan pemetaan misi dan sasaran yang telah dilakukan terhadap kebijakan pembangunan level nasional hingga daerah, terlihat bahwa terdapat keselarasan antar kebijakan setiap level dan seluruhnya mengacu pada pokok pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam setiap misi rencana pembangunan terkandung 5 pilar pembangunan kependudukan, yaitu: (1) Pengendalian kuantitas penduduk, (2) Peningkatan kualitas penduduk, (3) Pembangunan keluarga berkualitas, (4) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dan (5) Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, baik secara eksplisit maupun implisit. Pada umumnya, dalam RPJP Nasional maupun daerah, memiliki satu misi yang mencakup tiga pilar pembangunan kependudukan di antaranya, pengendalian kuantitas penduduk peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas. Namun, pengendalian kuantitas juga belum secara eksplisit disebutkan dalam misi dan belum terdapat sasaran pembangunan yang secara langsung merujuk pada pengendalian kuantitas penduduk. Pilar pembangunan kependudukan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas seringkali tidak sebutkan secara eksplisit dalam misi rencana pembangunan. Namun, pilar tersebut pada umumnya menjadi manfaat lanjutan dari misi dan sasaran rencana pembangunan secara merata, berkeadilan dan merata. Adapun pilar pembangunan kependudukan berupa penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan juga tidak eksplisit disebutkan dalam misi rencana pembangunan melainkan disebutkan secara spesifik dalam sasaran dan strategi pembangunan bidang tata Kelola pemerintahan.

Pada setiap misi pembangunan wilayah, terdapat strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan termasuk pembangunan kependudukan. Berdasarkan hasil identifikasi RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023, ternyata kelima misi dalam RPJMD Kabupaten Tangerang memiliki sasaran dan strategi pembangunan yang mengandung pilar pembangunan kependudukan seperti yang diuraikan dalam Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
Misi ke-1: Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	1. Meningkatkan kepatuhan <i>stakeholders</i> terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
			2. Meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas peserta didik
			3. Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh agama
			4. Meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan petugas pemulasaran jenazah
Misi ke-2: Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
			2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sarana / fasilitas kesehatan yang berkualitas
			3. Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	1. Meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender
			2. Menyusun kebijakan berbasis gender dan perencanaan dan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			penganggaran yang responsif gender
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
			2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
			3. Meningkatkan minat baca masyarakat
			4. Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya
Misi ke-3: Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan - Hasil Revisi	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/ <i>skill</i>	1. Meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan
Misi ke-4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan public	1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan,
			2. Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi,
		Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan <i>e-government</i>	1. Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan,
Misi ke-5: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi wilayah

Berdasarkan pemaparan di awal, dalam Misi RPJMD Kabupaten Tangerang 2019- 2023, terdapat 4 misi yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan yaitu misi 1,2,4 dan 5. Namun, jika diidentifikasi lebih dalam, ternyata di dalam misi ke-3 mengenai upaya peningkatan daya saing antar daerah, terdapat sasaran peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi khusus dalam bekerja dengan cara peningkatan pelatihan ketenagakerjaan. Hal tersebut juga berkaitan dengan pilar peningkatan kualitas penduduk.

Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dengan tujuan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat memiliki sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan pilar pembangunan keluarga berkualitas, yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama.

Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia memiliki tiga sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas, yaitu: (1) Meningkatnya Derajat Kesehatan, (2) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan (3) Meningkatnya Kualitas Pendidikan. Misi ke-4 dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah memiliki dua sasaran yang berkaitan dengan kependudukan pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yaitu: (1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik dan (2) Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan *e-government*. Misi ke-5 dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah memiliki satu sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur.

Adapun rencana pembangunan kependudukan di Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi lebih lanjut pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 berikut<sup>4</sup>. Misi ketiga juga dimasukkan mengingat jika diidentifikasi secara lebih mendalam, terdapat sasaran yang mengarah pada pilar peningkatan kualitas penduduk.

---

<sup>4</sup> Indikator sasaran dan program serta kegiatan yang dituliskan dalam Tabel 2.11 adalah indikator sasaran yang berkaitan dengan 5 pilar pembangunan kependudukan

Tabel 2.12 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 mengenai Pembangunan Kependudukan

MISI I	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
Misi ke-1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius	Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	Indeks Ketentraman dan Ketertiban
			Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban
			Persentase anak usia sekolah yang meningkat kemampuannya dalam BTQ
			Persentase guru ngaji yang menerima insentif
Misi ke-2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka IPM
			Angka Harapan Hidup (AHH)
			Prevalensi stunting
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)		
Misi ke-3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata	Tingkat Pengangguran
			Tingkat Kemiskinan
		Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skill	Tingkat produktifitas tenaga kerja
Misi ke-4 Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan <i>e-government</i>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Misi ke-5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik

MIS I	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN
hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah			

Setelah menelaah kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan kependudukan, langkah selanjutnya ialah menelaah implementasi kebijakan tersebut berupa rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dapat diidentifikasi dari Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021.



Tabel 2.13 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Pilar Pembangunan Kependudukan

Pilar Pembangunan Kependudukan	Program/ kegiatan	Pelaksana (Dinas)
Pengendalian kuantitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program keluarga berencana</li> <li>• Program pembinaan ketahanan keluarga dan remaja</li> <li>• Program pengendalian penduduk</li> <li>• Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</li> </ul>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan kualitas penduduk Dan Pembangunan keluarga berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat</li> <li>• Program peningkatan mutu guru dan tenaga</li> <li>• Program bantuan operasional sekolah (BOS)</li> <li>• Program pendidikan karakter sekolah dasar</li> <li>• Program pendidikan karakter sekolah menengah pertama</li> <li>• Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>• Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun jenjang sekolah dasar</li> </ul>	Dinas Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan</li> <li>• Program peningkatan kesehatan keluarga</li> <li>• Program peningkatan penanggulangan penyakit</li> <li>• Program pengembangan sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	Dinas Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</li> <li>• Program perlindungan dan jaminan sosial</li> </ul>	Dinas Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Program peningkatan kesempatan kerja</li> <li>• Program pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja</li> </ul>	Dinas Tenaga Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</li> <li>• Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</li> <li>• Program advokasi dan peningkatan perlindungan</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pilar Pembangunan Kependudukan	Program/ kegiatan	Pelaksana (Dinas)
	perempuan dan anak • Program peningkatan kualitas hidup anak • Program peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak	
	• Program penataan dan pembinaan desa • Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan • Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa • Program pengembangan lembaga kemasyarakatan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	• Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda • Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk  <i>(Pembangunan pada pilar ini memerlukan jembatan program yang memiliki dampak lanjutan terhadap mobilitas penduduk)</i>	• Program penataan ruang • Program pembangunan sarana dan prasarana dasar	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
	• Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman • Program penataan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan • Program pengembangan kawasan permukiman • Program gebrak pakumis	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
	• Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif • Program peningkatan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	• Program migrasi regional (pengarahan dan pembinaan transmigrasi/migrasi)	Dinas Tenaga Kerja
	Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan	• Program pelayanan administrasi kependudukan • Program pelayanan administrasi pencatatan sipil • Program pengelolaan informasi administrasi • Program pengelolaan pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan
• Program pengelolaan aplikasi informatika (Pengelolaan dan		Dinas Komunikasi dan

Pilar Pembangunan Kependudukan	Program/ kegiatan	Pelaksana (Dinas)
	Pemeliharaan Sistem E- <i>government</i>	Informatika

Berdasarkan Tabel 2.12 mengenai keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, belum terdapat sasaran dan indikator sasaran yang mengarah pada pengendalian kuantitas penduduk. Namun, pada implementasinya, sudah ada program berkenaan dengan pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti yang tercantum pada Tabel 2.13. Secara keseluruhan dengan mengacu pada GDPK Nasional 2011-2035, seluruh program atau kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang (Tabel 2.13) telah memenuhi pokok-pokok pembangunan kependudukan.

*Pertama*, pilar pengendalian kuantitas penduduk secara khusus dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melaksanakan kelima strategi yaitu integrasi, desentralisasi, kemitraan, pemberdayaan dan fokus pada masyarakat msikin.

*Kedua*, pelaksanaan pilar peningkatan kualitas penduduk sebagaimana disebutkan dalam GDPK Nasional, dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi Kesehatan, pendidikan dan ekonomi sehingga pilar ini diimplementasikan dalam bentuk berbagai program dari banyak dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

*Ketiga*, pilar pembangunan keluarga berkualitas juga terinternalisasi dalam program-program peningkatan kualitas penduduk seperti program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas lainnya.

*Keempat*, pilar persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan secara khusus oleh Dinas Tenaga Kerja berupa program migrasi regional (pengarahan dan pembinaan transmigrasi/migrasi). Selebihnya, upaya-upaya pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan cara melakukan pembangunan ekonomi dan infrastruktur secara merata untuk mencegah banyaknya penduduk yang berpindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Arahan dalam GDPK Nasional menyebutkan perlu adanya peraturan daerah tentang kebijakan mobilitas penduduk. Pemerintah Kabupaten

Tangerang juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 – 2031. Salah satu poin di dalamnya yang berkaitan dengan pengarahannya mobilitas penduduk yaitu mengenai pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah kabupaten melalui beberapa strategi yaitu:

- Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian
- Mewujudkan pusat-pusat kegiatan wilayah baru sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tangerang
- Mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan hirarkinya
- Meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan,
- Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Tangerang dan Meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa

Selain itu, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang juga diarahkan pada pengaturan kawasan peruntukkan pemukiman penduduk berdasarkan kepadatan penduduknya. Pemukiman perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi atau lebih dari 4.000 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk sedang diasumsikan sekitar 2.500-4.000 jiwa/km<sup>2</sup> dengan total luas wilayah lebih dari 27.937 hektar meliputi 20 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pagedangan;
2. Kecamatan Cisauk;
3. Kecamatan Legok;
4. Kecamatan Kelapa Dua;
5. Kecamatan Curug;
6. Kecamatan Cikupa;
7. Kecamatan Pasar Kemis;
8. Kecamatan Balaraja;
9. Kecamatan Sukamulya;
10. Kecamatan Tigaraksa;
11. Kecamatan Panongan;
12. Kecamatan Jambe;
13. Kecamatan Cisoka;
14. Kecamatan Solear;

15. Kecamatan Jayanti;
16. Kecamatan Teluknaga;
17. Kecamatan Sepatan;
18. Kecamatan Sepatan Timur;
19. Kecamatan Kosambi; dan
20. Kecamatan Sindang Jaya.

Sedangkan, pemukiman perdesaan dengan kepadatan penduduk rendah atau dengan penduduk kurang dari 2.500 jiwa/km<sup>2</sup> memiliki luas total 16.631 hektar meliputi 9 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kronjo;
2. Kecamatan Mekar Baru;
3. Kecamatan Gunung Kaler;
4. Kecamatan Kresek;
5. Kecamatan Mauk;
6. Kecamatan Kemiri;
7. Kecamatan Rajeg;
8. Kecamatan Pakuhaji; dan
9. Kecamatan Sukadiri.

*Kelima*, Pilar pembangunan *database* kependudukan juga diimplementasikan dengan baik berupa adanya program-program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khusus dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan sistem secara *online* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 2.2.3. Identifikasi Pencapaian Program Pembangunan Kependudukan Daerah

Keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diukur dalam berbagai indikator yang diistilahkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan pengukuran akumulasi pencapaian indikator program (*outcomes*) pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019–2023. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro yang berperan sebagai indikator utama untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah ditunjukkan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa target indikator makro berdasarkan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2021 mengalami peningkatan untuk laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, rasio gini dan inflasi mengalami penurunan. Target indikator tahun 2022-2023 diharapkan dapat terpenuhi hingga akhir RPJMD dengan dilaksanakan visi misi Kabupaten Tangerang melalui pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang optimal.

Tabel 2.14 Keselarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional

No.	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022						RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023				
		2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.60	5.8	5.9	6.1	6.2	5.70	6.00	6.20	5.80	5.95	6.10	5.9	6	6.1	6.2	6.3
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9.81	9.43	9	8.55	8.15	5.25	5.13	5.00	5.12	5.06	5.00	5.1	5.05	5	4.95	4.9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.20	4.00	3.80	3.40	3.10	8.69	8.45	8.20	8.19	8.03	7.84	9.65	9.61	9.32	9.05	8.8
4	Indeks Pembangunan Manusia					75.54	71.35	71.77	72.2	72.75	73.21	73.68	71.6	71.7	71.8	71.9	72
5	Rasio Gini					0.360-0.374	0.40	0.390	0.390	0.370	0.365	0.360	0.325	0.285	0.26	0.24	0.22
6	Penurunan Emisi GRK (%)					27.3											
7	Inflasi						4	3.7	4.20	3.70	3.70	3.70	3.45	3.4	3.35	3.3	3.25

Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Arah kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

Pembangunan Tahun 2019 akan diarahkan pada: Pemantapan Infrastruktur, Penguatan Daya Saing Serta Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan.

- a. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial
- b. Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatkan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha
- e. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan keberagaman
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
- g. Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
- h. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah
- i. Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi Arah kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Pembangunan Tahun 2020 akan diarahkan pada: Pemulihan Ekonomi dan Sosial

- a. Menerapkan Ekstrakurikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal
- b. Mengoptimalkan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)
- c. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan
- d. Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur
- e. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasis kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat
- f. Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak
- g. Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan



- i. Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsistensi regulasi dan teknologi informasi

Pembangunan Tahun 2021 akan diarahkan pada: Percepatan Pemulihan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
- b. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
- c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
- d. Percepatan pemulihan sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- e. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
- f. Perumusan kebijakan dan pembangunan sistem yang mendukung berkembangnya budaya inovasi

Pembangunan Tahun 2022 akan diarahkan pada: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan

- a. Penguatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
- c. Penguatan kualitas dan daya saing daerah
- d. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- e. Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah
- f. Meningkatkan iklim inovasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan ekonomi.

Pembangunan Tahun 2023 akan diarahkan pada: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, produktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis inovasi

- a. Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
- b. Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
- c. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
- d. Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola

- pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- e. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
- f. Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal

Berikut arah kebijakan Kabupaten Tangerang 2019-2023 berdasarkan pilar pembangunan kependudukan:

- Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pilar pembangunan keluarga berkualitas, yaitu berfokus pada kebijakan peningkatan, penguatan dan pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama dan kebijakan pemenuhan, peningkatan dan pemantapan kualitas sarana prasarana kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender.

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Peningkatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	Penguatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
Peningkatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender

- Pilar persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, yaitu berfokus pada kebijakan pembangunan, pemerataan dan peningkatan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas	Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

- Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yaitu berfokus pada kebijakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Percepatan pemulihan sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

### 2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan kebijakan alokasi anggaran, program prioritas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) prioritas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prioritas II, Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. Prioritas III, Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

#### 2.3.1. Program Pembangunan Daerah

Program Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian Visi Misi yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategis yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan 10 (sepuluh) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas OPD,

sehingga program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Program-program tersebut dapat diimplementasikan dalam pilar-pilar pembangunan kependudukan, sebagai berikut: pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas (Tangerang religi; gerakan sekolah menyenangkan; gerakan Tangerang sehat). Pilar penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk (tangerang mandiri tahan pangan; gerakan pembangunan masyarakat pantai (gerbang mapan); gerakan berantas kawasan padat, kumuh dan miskin (gebrak pakumis) plus; kita peduli permasalahan sampah (kiprah); pengendalian kemacetan lalu lintas (pekat lantasi); produk inovatif dan kreatif (proaktif)). Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan (optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen asset (optima)). Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.15.

A. Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas (Tangerang religi; gerakan sekolah menyenangkan; gerakan Tangerang sehat).

#### 1. Tangerang Religi

Dalam rangka meningkatkan nilai religius sebagai nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama merupakan hal yang penting yang dilakukan dengan memberikan insentif kepada Guru Ngaji, peserta didik dapat lebih maksimal dalam mendapatkan pengetahuan dibidang keagamaan. Selama 5 (lima) tahun diberikan insentif kepada Guru Ngaji. Selain itu untuk mengembangkan karakter siswa yang tingkah lakunya berdasarkan standar-standar moral dan etika, dalam pendidikan formal telah dikembangkan ekstrakurikuler keagamaan yang targetnya sampai dengan tahun 2023 seluruh sekolah dapat menerapkan pendidikan karakter. Program ini ditangani oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Pendidikan.

#### 2. Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM)

Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) merupakan gerakan sosial bersama guru untuk menciptakan budaya belajar yang kritis, kreatif, mandiri dan menyenangkan di sekolah. Gerakan ini mempromosikan dan membangun kesadaran guru-guru, kepala

sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun Sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar ilmu pengetahuan dan bekal ketrampilan hidup agar anak-anak menjadi pembelajar yang sukses. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menuju Gerakan Sekolah Menyenangkan adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, mewujudkan ekosistem sekolah yang ramah, aman dan nyaman, meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik peserta didik, menjaga dan merawat sanitasi sekolah (Sanisek) dan mensukseskan Kurangi Sampah Sekolah Kita (Kurasaki). Selama 5 (tahun) ditargetkan seluruh sekolah di Kabupaten Tangerang telah mengembangkan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Program pendukung antara lain pembangunan Tambah Ruang Kelas, pembangunan Unit Sekolah Baru khususnya untuk jenjang SMP yang dalam penerimaan siswa baru menggunakan system zonasi dan sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, kantin dan mushola. Selain itu dialokasikan beasiswa anak sekolah dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berprestasi dari jenjang SD dan SMP. Program ini ditangani oleh Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

### 3. Gerakan Tangerang Sehat

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan menjadi target pembangunan yang diprioritaskan oleh Kepala daerah dan segenap jajarannya. Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas serta peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap menjadi salah satu upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 22 Puskesmas di Kabupaten Tangerang menjadi Puskesmas Rawat Inap. Selain itu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan beroperasinya RSUD di wilayah barat untuk menangani masyarakat Kabupaten Tangerang. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan promotif dan preventif kesehatan untuk ibu hamil, usia produktif dan usia lanjut serta meningkatkan kesehatan melalui pendekatan keluarga untuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selain itu juga menyiapkan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan meningkatkan kepesertaan JKN –KIS. Program ini ditangani oleh Dinas Kesehatan, RSUD Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Pantura, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

#### B. Pilar penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk (tangerang mandiri tahan pangan; gerakan pembangunan

masyarakat pantai (gerbang mapan); gerakan berantas kawasan padat, kumuh dan miskin (gebrak pakumis) plus; kita peduli permasalahan sampah (kiprah); pengendalian kemacetan lalu lintas (pekat lantas); produk inovatif dan kreatif (proaktif).

1. Tangerang Mandiri Tahan Pangan (TANGERANG MANTAP)

Program Tangerang Mandiri Tahan Pangan dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan subsistem ketersediaan distribusi dan konsumsi, dengan memanfaatkan sumber daya yang di wujudkan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian dan pengembangan kawasan agropolitan dengan fokus pembangunan sentra hortikultura. Selain itu untuk mendukung program ini dilakukan revitalisasi pasar untuk mengembangkan pasar higienis, optimalisasi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengembangan budidaya perikanan. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan BUMD.

2. Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (GERBANG MAPAN)

Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) dicanangkan untuk meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan. Kondisi wilayah pantai utara yang didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi alasan peluncuran program ini. Selain pengembangan ekonomi juga turut didukung dengan pengembangan infrastruktur masyarakat secara merata. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan para nelayan dan peningkatan sarana prasarana perikanan serta penyediaan infrastruktur pendukung pada desa-desa fokus Program Gerbang Mapan desa Kronjo Kecamatan Kronjo, Desa Patrasana Kecamatan Kemiri, Desa Ketapang Kecamatan Mauk, Desa Suryabahari Kecamatan Sukadiri, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga. Pengembangan obyek wisata mangrove dan sentra budidaya ikan juga akan ikut menggerakkan perekonomian dikawasan pesisir. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup.

3. Gerakan Berantas Kawasan Padat, Kumuh Dan Miskin (GEBRAK PAKUMIS) Plus

Program Gebrak Pakumis Plus ini diselenggarakan untuk menangani permasalahan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai

yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan. Melalui program ini direncanakan setiap tahun dapat dituntaskan 20 kawasan permukiman penduduk. Pada kawasan yang diberikan program ini selain kegiatan fisik juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pelatihan wirausaha. Selain itu masyarakat juga diberikan akses untuk mendapatkan bantuan pemodalan dan untuk meningkatkan ketahanan pangan dikembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memanfaatkan pekarangan rumah. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kecamatan.

#### 4. Kita Peduli Permasalahan Sampah ( KIPRAH)

Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah masalah persampahan. Upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan ini adalah mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara pengembangan TPST 3R dan pembentukan Bank Sampah. Revitalisasi TPA dilakukan untuk meningkatkan kinerja persampahan selain itu dilakukan optimalisasi system manajemen pengelolaan persampahan. Upaya untuk mengurangi volume sampah juga dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk peduli pada permasalahan sampah melalui Program Kurasaki (Kurangi Sampah Sekolah Kita) untuk mengurangi produksi sampah khususnya sampah plastik dan sterofom. Sedangkan dikantor Pemerintahan dilakukan dengan mencanangkan program Kurasakan (Kurangi Sampah Kantor). OPD yang menangani program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kecamatan.

#### 5. Produk Inovatif Dan Kreatif (PROAKTIF)

Kabupaten Tangerang yang berada dalam posisi strategis diwilayah Jabotabekjur harus memiliki keunggulan dan daya saing dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan usaha, yang dimaksud kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan inovatif adalah memperkenalkan atau mengembangkan hal-hal baru. Peran pemerintah dalam menggali dan mengembangkan inovasi dan kreatifitas dikalangan masyarakat sangat penting. Setiap kecamatan dan desa didorong untuk memiliki produk unggulan yang merupakan ciri dan potensi lokal. Upaya untuk mendukung hal tersebut antara lain dengan menyelenggarakan berbagai event promosi, optimalisasi gerai IKM serta fasilitasi

permodalan untuk IKM dan UKM. Pengembangan inovasi juga dilakukan dikalangan pemerintahan dengan meningkatkan inovasi OPD sehingga meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dengan pengembangan laboratorium inovasi dan festival inovasi dan kreasi.

#### 6. PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKAT LANTAS)

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia. Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan antara lain pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug- Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Maka perlu penanganan untuk memelihara kondisi jalan atau pembukaan akses terutama pada simpang-simpang geometri dan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga untuk mengatasi kemacetan akan dibangun fly over dan Terminal Tipe C. OPD yang menangani program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan.

C. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan (optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen asset (optima)).

#### 1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Manajemen Asset (OPTIMA)

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, maka dikembangkan EGovernment. Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, kinerja pelayanan perijinan yang efektif dan efisien dapat menciptakan iklim investasi di Kabupaten Tangerang. Optimalisasi Pendapatan Daerah diupayakan melalui system pendapatan yang terintegrasi dan pengelolaan asset daerah. Kinerja pengawasan yang saat ini telah mencapai level 3 untuk SPIP harus terus ditingkatkan. Program ini juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan publik yang ada termasuk Pelayanan Administrasi Terpadu



Kecamatan (PATEN). Berbagai aplikasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tangerang harus terintegrasi sehingga perlu dibangun IT Center dan Pengembangan sistem satu data yang didukung oleh kuatnya system database dari masing-masing OPD. Berbagai upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas sehingga terselenggara tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh OPD terlibat dalam program ini, dengan leading sektornya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, pada Tabel 2.15 dapat dilihat secara rinci program/kegiatan prioritas Kabupaten Tangerang dan pencapaiannya berdasarkan pilar-pilar pembangunan.

Tabel 2.15 Program Unggulan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD	
1	Tangerang Religi	Insentif Guru Ngaji	Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji	Orang/Tahun	3.014	3.288	3.562	3.836	4.110	17.810	Setda
		Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah	Tersedianya Penerima Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah	Orang/Tahun	548	822	1.096	1.370	1.644	5.480	Setda
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an SD	Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Qur`an SD	Orang	0	5.000	-	-	-	5.000	Disdik
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an	Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur`an	Sekolah	0	-	10.000	10.000	10.000	30.000	Disdik
2	Sanitasi Pondok Pesantren (SANITREN)	Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan	pondok pesantren	150	0	150	150	150	600	Bappeda
3	Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM)	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	USB	5	0	2	4	4	15	Disdik



No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD	
		a. Feasibility study	Jumlah dokumen FS	Dokumen	1	0	1	1	1	1	DINKES
		b. Master plan dan Detail engineering design	Jumlah dokumen Master plan	Dokumen	1	0	1	1	1	1	DINKES
		c. penyediaan lahan	Luas Lahan	M <sup>2</sup>	-	5.844	36.784	42.628	42.628	42.628	DINKES
		d. pembangunan	Jumlah Bangunan yang dibangun	Unit	-	0	1	1	1	1	DINKES
		Alat Kesehatan & Sarpras	Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras	Paket	-	0	2	2	2	2	DINKES
		Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan	Jenis	-	0	6	6	6	6	DINKES
		Obat dan BMHP	Jumlah Paket Obat & BMHP	Paket	-	0	2	2	2	2	DINKES
		e.operasional	Jumlah Operasional	Paket	-	0	1	1	1	1	DINKES
5	MASYARAKAT BUGAR	Peningkatan Sarana dan prasarana Olahraga	Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana Sport Center	Sport center	1	1	1				DTRB
			Persentase Kelengkapan Pembangunan Sport Center	Persentase							
			Optimalisasi Stadion Mini Kecamatan	Stadion	1	0	1	-	-	-	DTRB
		Olahraga Bersama Masyarakat	Jumlah kelompok yang berolahraga	Kelompok	643	1093	350	400	427	2.913	DISPORA

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD	
		Fungsionalisasi Stadion Mini	Jumlah pemanfaatan stadion mini	Event	2	2	2	2	2	10	DISPORA
6	SAYANG BARUDAK	Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah yang ramah anak	Sekolah	77	152	200	250	250	929	DP3A
		Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak	Jumlah anak yang ikut pusat kreativitas anak	Orang	200	0	100	100	125	525	DP3A
		Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang ramah anak	Kecamatan	6	20	25	29	29	29	DP3A
		Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas yang ramah anak	Puskesmas	7	11	22	33	44	44	DINKES
7	Tangerang Mandiri Tahan Pangan (TANGERANG MANTAP )	Pengembangan Kawasan Agropolitan		Kawasan	1	1	1	1	1	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan	Ha	100	100	100	100	100	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		<i>Pembangunan Pusat Hortikultura:</i>									DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD	
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD		
		1. Desain Pusat Hortikultura	Jumlah dokumen DED	DED	0	1	0	0	0	0	1	DTRB
		2. Pembangunan Pusat Hortikultura	Jumlah pusat hortikultura	Unit	0	0	1	0	0	0	1	DTRB
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana pusat Hortikultura	Paket	0	0	0	0	1	0	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan		Kawasan	1	1	0	0	0	0	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan	Ha	1500	1500	4.500	3.000	2.800	13.300	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pembangunan Daerah Irigasi LP2B	Presentase Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	Persen	0	1,45						DBMSDA
		Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL )	Jumlah kelompok KRPL	Kelompok	13	45	10	10	10	70	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (GERBANG	Penanaman Mangrove	Jumlah lokasi penanaman	Lokasi	4	7	0	0	0	0	6	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD	
	MAPAN)										
		Pembangunan WANA WISATA TMC	Jumlah wanawisata yang dibangun	Paket	1	0	0	0	0	1	DTRB
		Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan ( <i>Urban Aqua Cultur</i> )									
		1. Desain Urban Aqua Cultur	Jumlah dokumen	DED/FS	1	0	0	0	0	1	DINAS PERIKANAN
		2. Pembangunan Urban Aqua Cultur	Jumlah Urban Aqua Cultur yang dibangun	Unit	1	1	1	1	1	5	DINAS PERIKANAN
		3. Penataan Lahan Urban Aqua Cultur	Jumlah lahan Urban Aqua Cultur yang ditata	Kawasan	1	1	1	1	1	4	DINAS PERIKANAN
		4. Pemeliharaan dan Operasionalisasi	Jumlah yang dipelihara	Paket	0	0	1	1	1	1	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan	Jumlah orang yang diberdayakan	Orang	170	220	150	150	150	750	DINAS PERIKANAN
			Jumlah unit kolam	unit kolam bulat	50	170	0	40	40	300	DISKAN
		Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Nelayan	110	24	150	150	150	584	DISKAN
			Jumlah alat penangkap ikan (API)	unit api	3500	3905	3500	3500	3500	17905	DISKAN





No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD	
		1. Desain BLK	Jumlah dokumen	DED	0	0	-	1	-	1	DTRB
		2. Pengadaan lahan	Jumlah lahan yang tersedia	Paket	2.000	1.894	8.196	-	-	12.090	DINAS PERKIM
		3. Pembangunan BLK	Jumlah BLK yang Dibangun	Unit	0	0	-	-	1	1	DTRB
		4. Optimalisasi BLK	Jumlah sarana dan prasarana BLK	Paket	0	0					DISNAKER
11	Gebrag Pakumis Plus (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN)	Bedah rumah berbasis Kawasan	Jumlah rumah yang direhab	Rumah	1000	1000	1.222	1.222	1.300	5.744	DINAS PERKIM
	PADAT KUMUH DAN MISKIN)										
		Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan	Jumlah Rumah tangga penerima air bersih	Titik	7	0	9	7	7	30	DINAS PERKIM
		Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan	Jumlah SR yang dibangun	SR	132	0	100	100	100	432	DINAS PERKIM
		Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas	Jumlah kawasan kumuh yang terlayani	Kawasan	8	0	-	-	-	8	DINAS PERKIM

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD	
		Serasi (Seribu Sanitasi)	Jumlah sanitasi yang dibangun	Unit	150	136	350	150	150	936	DINAS PERKIM
12	Kita Peduli Permasalahan Sampah (KIPRAH)	Optimalisasi TPS 3 R persampahan	Jumlah TPS 3 R yang dikelola	TPS3R	5	5	5	3	2	20	DLHK
		Penyediaan Prasarana dan Sarana	Jumlah bank sampah yang dikelola	Bank Sampah	31	19	10	10	10	70	DLHK
		pengelolaan Persampahan									DLHK
			Jumlah penanganan sampah	Kali	115	50	150	150	150	615	DLHK
		Penanganan sampah di Daerah Rawan Sampah					-	-	-	1	DLHK
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin									DLHK
		a. Pembuatan Masterplan TPA	Jumlah dokumen	Dokumen	1	0	-	-	-	1	DLHK
		b. Pemagaran TPA	Jumlah volume Pemagaran	Meter	0	-	-	-	-	-	DLHK
		c. Pembuatan Kantor	Jumlah bangunan yang Dibangun	Unit	0	-	-	-	-	-	DLHK

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD	
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD		
		d. Perbaiki Kolam Leacet	Jumlah bangunan yang direhab	Paket	0	-	-	-	-	-	-	DLHK
		e. Penataan Jalan TPA	Jumlah volume jalan yang ditata	Meter	0	-	-	-	-	-	-	DLHK
		f. Pembangunan IPAL	Jumlah IPAL yang Dibangun	Unit	0	-	-	-	-	-	-	DLHK
13	Pengelolaan Pemantauan Sumber Daya Air (LESTARI)	Infrastruktur Sungai dan Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik	Presentase sungaidan saluran kabupaten dalam kondisi baik	Persen	58,59	59,62	60,57	61,74	62,91	revisi		DBMSDA
		Pembangunan/Pe naingkatan Embung/Situ/Da nau	Pembangunan/Pe naingkatan Embung/Situ/Dan au	buah	-	0	1	0	0	revisi		DBMSDA
		Pembangunan Daerah Irigasi	Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	Daerah Irigasi (DI)	1,00	0	5	8	0	revisi		DBMSDA
14	Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas (Pekatlantas)	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)	Terbangunnya ATCS	Titik	0	0	0	0	3	3		DISHUB
		FS ATCS	Tersedianya FS ATCS	Dokumen	1	0	0	0	0	1		DISHUB
		DED ATCS	Tersedianya DED ATCS	Dokumen	1	0	0	0	0	1		DISHUB

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir RPJMD	
		Pembangunan Terminal FS dan DED Tipe C	Tersedianya Terminal FS dan DED Tipe C	Dokumen	1	0	0	0	0	1	DISHUB
		Pembangunan terminal Tipe C	Tersedianya Terminal Tipe C	Unit	0	0	0	9	1	1	DISHUB
		Pembangunan/Pe ingkatan Jalan Kabupaten	Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	88,55	87,55	89,06	90,57	92,08	revisi	DBMSDA
		Penanganan kemacetan lalu lintas	Jumlah titik kemacetan yang tertangani	Titik	2	1	4	4	5	16	DISHUB
15	Proaktif (Produk Inovatif Dan Kreatif)	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pelaksanaan kesenian dan kebudayaan	Event..	22	0	8	10	10	50	DISPORA
		Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Unggulan dan Strategis	Jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	0	0	2	2	3	7	DISPORA
		Bantuan Promosi Usaha Mikro	Jumlah Bantuan Promosi Usaha Mikro	Event	3	3					DINAS KOPERASI

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten secara rinci disajikan pada Tabel 2.16. Program pembangunan daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 berdasarkan pilar pembangunan kependudukan, secara rinci disajikan pada Tabel 2.17.

Hasil analisis program berdasarkan pilar peningkatan kualitas penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya (2019-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD.

Pilar pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:

- Program keluarga berencana;
- Program pengendalian penduduk;
- Program pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Hasil analisis program berdasarkan pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas peningkatan setiap tahunnya (2019-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD.

Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas, meliputi

- Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- Program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan;
- Program bantuan operasional sekolah ( BOS );
- Program pendidikan karakter sekolah dasar;
- Program pendidikan karakter sekolah menengah pertama;
- Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun jenjang sekolah menengah pertama;
- Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun jenjang sekolah dasar;
- Program peningkatan pelayanan kesehatan;
- Program peningkatan kesehatan keluarga;
- Program peningkatan penanggulangan penyakit;

- Program pengembangan sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- Program perlindungan dan jaminan sosial;
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- Program peningkatan kesempatan kerja;
- Program pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- Program advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
- Program peningkatan kualitas hidup anak; program peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak;
- Program penataan dan pembinaan desa;
- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- Program pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

Hasil analisis program berdasarkan pilar penataan dan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk peningkatan setiap tahunnya (2019-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD.

Pilar penataan dan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, meliputi:

- Program penataan ruang;
- Program pembangunan sarana dan prasarana dasar;
- Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman;
- Program penataan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- Program pengembangan kawasan permukiman;
- Program gebrak pakumis;
- Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
- Program peningkatan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro;
- Program transmigrasi regional.

Hasil analisis program berdasarkan pilar penataan dan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk peningkatan setiap

tahunnya (2019-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD.

Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, meliputi:

- Program program pelayanan administrasi kependudukan;
- Program pelayanan administrasi pencatatan sipil;
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Program pengelolaan pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan;
- Program pengelolaan aplikasi informatika.

Tabel 2.16 Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 – 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN							
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	66,52	70	75	80	100	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	69,90	70	75	80	100	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	68,09	70	75	80	100	Dinas Pendidikan
	BIDANG URUSAN KESEHATAN							
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalinyang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan	Jumlah Bayi baru						



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional(%)	Perangkat Daerah
	bayi baru lahir	lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	93,57	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	89,32	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	53,24	60	65	70	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	84,45	85	90	95	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	85,62	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan Kesehatan	80,65	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani	76,66	90	95	100	100	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional(%)	Perangkat Daerah
	berat	Kesehatan						
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan Kesehatan	53,42	70	80	90	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan Kesehatan	76,43	80	85	90	100	Dinas Kesehatan
	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM							
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	36,46	50	55	60	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	0,52	10	15	20	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni bagi korban bencana di	15,00	20	30	35	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional(%)	Perangkat Daerah
		rumah layak huni						
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga negarayang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	30	40	50	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	Satuan PolPP
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	59,56	70	80	100	100	BPBD
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	78,11	80	90	100	100	BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional(%)	Perangkat Daerah
		Bencana						
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	78,36	90	100	100	100	BPBD
	BIDANG URUSAN SOSIAL							
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20,29	40	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	17,28	40	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negaralanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	17,47	40	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	65,55	70	75	80	100	Dinas Sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten	40	60	70	80	100	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional(%)	Perangkat Daerah
	dan paksa bencana bagi korban bencana Kabupaten	yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial						

Tabel 2.17 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tangerang

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius											
Meningkatkan perilaku spiritualitas masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1.03	Indeks	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.08		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	70	Persen	72	74	76	78	80	80		
Program Pendidikan Karakter Sekolah Dasar	Prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat sekolah dasar	0	Persentase	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00	Dinas Pendidikan	
Program Pendidikan Karakter Sekolah Menengah	prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat	0	Persentase	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	Dinas Pendidikan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Pertama	menengah pertama									
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Pelanggaran Kyang Terselesaikan	100	Persentase	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penegakan Perdayang ditindaklanjuti	100	Persentase	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Capaian Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik	75	Persentase	75	77	80	80	80	80	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik	1	Mitra	1	1	1	1	1	5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban	Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan	100	Persentase	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
dan keamanan	trantibum dan linmas									Praja
Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum	Prosentase SDM Anggota Satpol PP yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100	Persentase	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Fasilitasi Lembaga dalam bidang politik	78	Persentase	78	78	78	78	79	79.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Inventarisasi Sarana Prasarana Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesra	10	Jumlah	10	10	10	10	10	50	Sekretariat Daerah
	Persentase Pembina Keagamaan yang Aktif	100	Persentase	100	100	100.00	100	100	100.00	Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat											
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Angka IPM	71.59	Angka	71.6	71.7	71.8	71.9	72	72		
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	69.61	Angka	70.27	70.87	71.17	71.47	71.77	71.77		
Program UKP Rujukan	Prosentase Screening pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	100	Persentase	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dinas Kesehatan	
	Prosentase keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate)	85	Persentase	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	Dinas Kesehatan	
	Prosentase pelayanan penderita hipertensi	0			0	0	0	0		Dinas Kesehatan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
	Prosentase pelayanan										
	kesehatan penderita diabetes melitus	100	Persentase	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Dinas Kesehatan	
	Prosentase pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ berat	100	Persentase	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Dinas Kesehatan	
	Bed Occupancy Ratio (BOR)	75	Persentase	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Dinas Kesehatan	
	Terpenuhinya operasional pelayanan rumah sakit	100	Persentase	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	RSUD Kab Tangerang	
	BOR (Bed Of Rate) Rumah Sakit	75	Persentase	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Rumah Sakit Umum Balaraja	
Program UKM Rujukan	Cakupan Ibu Hamil mendapat pelayanan K sesuai standar	96	Persentase	100.00					100.00	Dinas Kesehatan	
	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	92	Persentase	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dinas Kesehatan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	99	Persentase	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan anak Balita	98	Persentase	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan penjangkaran murid kelas sampai kelas 9 SD sederajat dan usia - tahun untuk luar sekolah	0	Persentase	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan Warga Negara Usia 0 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	88	Persentase	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Dinas Kesehatan
	Prevalensi anemia ibu hamil	0	Persentase	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah	Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana rumahsakit di RSUD Kabupaten Tangerang Tahun	100	Persentase	100						RSUD Kab Tangerang

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata	2019										
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata	Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2019	100	Persentase	100						RSUD Kab Tangerang	
Program Pengendalian Pengembangan Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Persentase	100		0	0			Dinas Kesehatan, RSUD	
	Persentase Sarana, Prasaranadan Perlengkapan Kesehatan (ASPAK) Rumah Sakit	30	Persentase	60.00	0.00	-	0.00	0.00	60.00	Dinas Kesehatan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
	Tercapainya pengembangan rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan	100	Persentase	100.00							RSUD Kab Tangerang
	Terpenuhinya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	100	Persentase	100.00							Rumah Sakit Umum Balaraja
Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga	60	Persentase	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	70.00		Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	60	Persentase	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	70.00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat-Tempat Umum	75	Persentase	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat-Tempat Umum	75	Persentase	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75	Persentase	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75	Persentase	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Dinas Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	2	Persentase	0.00	2.00	1.00	8.00	11.00	11.00	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
	Utama										
	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	2	Rumah sakit	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	Dinas Kesehatan	
	Terpenuhi nya sumber daya kesehatan obat-obatan rumah sakit	100	Persentase	100.00	0.00	-	0.00	0.00	-	Rumah Sakit Umum Balaraja	
	Rumah sakit terakreditasi	100	Persentase	100.00	0.00	-	0.00	0.00	-	RSUD Kab Tangerang	
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Prosentase sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas sesuai standar	65	Persentase	68.00	70.00	73.00	75.00	78.00	80.00	Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan				0.00					22.00	Dinas Kesehatan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	0	Rumah sakit	0.00	8	16	4	2	3.00	Dinas Kesehatan
	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	0	Klinik	0.00	2	2	2	3	40.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan Rawat Jalan Puskesmas	17	Persentase	0.00	100	100	100	100	15.00	Dinas Kesehatan
	Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah	0	Rumah sakit	0.00	100	100	100	100	3.00	Dinas Kesehatan
	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) Puskesmas				100	100	100	100		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga		0	Persentase	0.00					100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan K4	91.8	Persentase	100.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	98.9	Persentase	100.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	0	Persentase	0.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan kesehatan balita	0	Persentase	0.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan penjarangan murid kelas 1 sampai kelas 9 SD sederajat dan usia 7 sampai 15 tahun untuk luar sekolah	0	Persentase	0.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan
	Cakupan Warga Negara Usia 60 tahun	40	Persentase	0.00	100	100	100	100	100.00	
	keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar									Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Presentase anemia ibu hamil	28	Persentase	0.00	38	36	34	32	32.00	Dinas Kesehatan
	Presentase balita malnutrisi	73	Persentase	0.00	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	Dinas Kesehatan
	Presentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan olah Raga		Persentase		43	66	84	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Persentase keluarga dengan akses jamban sehat	23	Persentase	0.00	75	76	78	80	80.00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Penanggulangan Penyakit		0	Persentase	100.00					100.00	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi	0	Persentase	100.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
	Persentase Screening pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	0	Persentase	100.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan	
	Persentase Pelayanan pada penderita ODGJ Berat	0	Persentase	100.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan	
	Persentase Respon time KLB < 24 jam	0	Persentase	100.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan	
	Persentase Pelayanan usia produktif	0	Persentase	100.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan	
	Persentase desa UCI	269	Desa	269.00	98.2	98.5	98.9	99.3	274.00	Dinas Kesehatan	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	0	Persentase	0.00	100	100	100	100	100.00	Dinas Kesehatan	
	Persentase Penemuan kasus baru TB (CDR)				65	70	73	76		Dinas Kesehatan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Persentase Pengendalian Penyakit Menular				100	100	100	100		Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		0	Sarana	0.00					118.00	Dinas Kesehatan
	Persentase sistem informasi di Fasilitas Kesehatan Terintegrasi dengan sistem informasi Dinas Kesehatan	0	Orang	0.00	20	25	26	27	299.00	Dinas Kesehatan
	Persentase Tenaga Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan yang telah mendapat peningkatan dan pengembangan	0	Persentase	0.00	23	24	25	26	70.00	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	kemampuan teknis									
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	0	Persentase	0.00	61	65	67	70,00	75.00	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	0	Persentase	0.00	60,00	65,00	70,00	75,00	80.00	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang tersedia di puskesmas sesuai standar				73,00	75,00	78,00	80,00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Kelembagaan PUGyang Aktif	0	Persentase	79	80	80.00	90	90	90.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	16.66	Persentase	16.66	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Presentase Desa yangtelah Membentuk PATBM dan PTPA	24	Persentase	39	39	39.00	39	38	39.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah kecamatan yang telah memenuhi standar Kecamatan Layak Anak / jumlah 9 kecamatan	31	Persentase	52	66	80.00	90	100	100.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak	Jumlah forum anak kecamatan Aktif /Jumlah Forum anak yang terbentuk	0	Persentase	100	100	100.00	100	100	100.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Persentase KBBaru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	24.83	Persentase	25.95	26.1	26.30	26.41	26.65	26.65	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Persentase KBBaru	43.22	Persentase	44.1	44.5	44.80	45.1	45.5	45.50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Menurunnya angka Putus Pakai Alat Kontrasepsi	5.89	Persentase	5.5	5.2	4.80	4.5	4.1	4.10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	Tersedianya pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	1	Rekomendasi	1	1	1	1	1	5.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase desa/kelurahannya memiliki data dan informasi	100	Persentase	100	100	100	100	100	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penyediaan Informasi Dan Data Keluarga	Persentase penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100	Persentase	100	0	-	0	0	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Remaja	Meningkatnya Persentase ketahanan keluarga yang aktif	82.3	Persentase	82.5	82.75	83.00	83.25	83.5	83.50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	Meningkatnya Persentase PPKBD Mandiri	1.1	Persentase	2	3	4.00	5	6	6.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kelompok Masyarakat yang berperan dalam Program KKBPK	10.58	Persentase	21.17	31.75	42.34	52.92	63.5	63.50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam berolahraga	86	Persentase	90	90	95.00	95	100	100.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Jumlah atlet yang dikirim(POPNAS)	63	Atlet	30	0	50.00	0	60	60.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah atlet yang dikirim(POPWIL dan POPDA)	323	Atlet	0	345	-	370	0	370.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.27	Angka	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	
Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	25.14	Angka	28.00	31.00	34.00	37.00	40.00	40.00	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) Kesetaraan	0.16	Angka	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Prosentase Lembaga Pendidikan Masyarakat yang Terakreditasi	32.96	Persentase	38.00	43.00	48.00	53.00	58.00	58.00	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84.03	Persentase	84.50	0	0	0		84.50	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64.84	Persentase	65.15	0	0	0		65.15	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi	16.48	Persentase	24.57	32.66	40.75	48.84	56.93	56.93	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase pencapaian SPM sesuai standar	80	Persentase	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS )	Porsentase satuan pendidikan negeri yang mendapatkan program BOS	100	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pendidikan
	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan BOP	8441	Orang	8,673.00	8,673.00	8,673.00	8,673.00	8,673.00	8,673.00	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni(APM) SMP/MTs	64.84	Persentase	65.15	65.80	66.10	66.70	67.05	65.05	Dinas Pendidikan
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan GSM	0	Satuan Pendidikan	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir	0	Nilai	45.01	45.25	45.50	45.75	46.00	46.00	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
	Nasional										
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI	84.03	Persentase	84.50	85.00	85.50	86.00	86.50	86.50	Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN)	0	Nilai	77.29	77.50	77.75	78.00	78.25	77.50	Dinas Pendidikan	
	Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan GSM	0	Satuan Pendidikan	70.00	85.00	100.00	115.00	130.00	130.00	Dinas Pendidikan	
Program pelestarian kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	27	Event	27	31	35.00	39	43	43.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
										Pariwisata	
Program pengembangan	Persentase Koleksi bahanbacaan										
koleksi bahan pustaka, sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan	dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bacaan untuk Masyarakat	12.87	Persentase	17.87	22.87	27.87	32.87	37.87	46.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Persentase revitalisasi perpustakaan umum	0	Persentase	2	2	2.00	2	2	10.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
Program pengembangan layanan perpustakaan dan kebudayaan gemar membaca	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan	40	Persentase	47	67	77.00	87	100	100.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan										
Menurunnya Kemiskinan	Prosentase Penduduk Miskin	5.18	Persen	5.1	5.05	5	4.95	4.9	4.9	
Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9.7	Prosentase	9.65	9.61	9.32	9.05	8.8	8.8	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya Jumlah Fakir Miskin	100220	Orang	99,804.00	98,924.00	97,739.00	96,343.00	94,873.00	94,873.00	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang	2.95	Persentase	6.14	12.78	20.56	29.16	38.17	38.17	Dinas Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	ditangani									
	Prosentase Gelandangan Pengemis yang ditangani	0	Persentase	9.00	23.00	41.00	64.00	92.00	92.00	Dinas Sosial
	Prosentase Lansia terlantar yang ditangani	1.18	Persentase	2.29	4.30	6.88	10.04	14.05	14.05	Dinas Sosial
	Prosentase Anak Terlantar yang ditangani	0	Persentase	0.41	0.95	1.56	2.33	3.18	3.18	Dinas Sosial
	Prosentase penyandang disabilitas yang ditangani	2.67	Orang	4.69	10.54	19.71	30.66	42.12	42.12	Dinas Sosial





Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan	Prosentase data dan Informasi tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terverifikasi dan valid dan Jumlah pemanfaat data PMKS dan PSKS	100	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Sosial	
	Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif	303	Orang	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	Dinas Sosial	
	Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan dan	0	Orang	50.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,250.00	Dinas Sosial	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	Konseling									
	Prosentase PSKS yang dibina	50.21	Persentase	66.25	69.30	70.42	72.50	72.50	72.50	Dinas Sosial
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerjayang dilatih	0	Persentase	5	5	5.00	5	5	5.00	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase lulusan pelatih yang ditempatkan	34.8	Persentase	35	37	39	42	45	45	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari kerjayang di tempatkan	4387	Orang	5	6.5	7.80	9	10	38.30	Dinas Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	23.68	Persentase	24	24.5	25.00	25.5	26	26.00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengembangan Industri	Prosentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang wajib standardisasi	12.34	Persentase	0	12.34	24.68	37.02	49.36	49.36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Transmigrasi Regional	Jumlah calon transmigran yang terseleksi	5	KK	10	10	10.00	10	10	50.00	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.32	Prosentase	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	
Program peningkatan ketahanan pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan	87.3	Persen	87.50	88.00	89.00	90.00	91.00	91.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Prosentase pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (HKI + PIRT dan Halal)	14.78	Persentase	25.28	25.8	38.70	51.6	64.5	64.50	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Pelaku Usaha Mikro Yang mengikuti Pelatihan (Kewirausahaan dan Pemasaran On Line)	10.5	Persentase	19.3	38.6	57.90	77.2	6.5	96.50	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Produk Lolos Kurasi (Pemilihan Produk)	4.56	Persentase	12.5	25	37.50	50	62.5	62.50	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro yang Menjalinkan Kemitraan	12.89	Persentase	10	20	30.00	40	50	50.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
	Persentase Usaha Mikro yang Memiliki Pangsa Pasar Keluar Daerah	5.85	Persentase	5.25	10.5	15.75	21	26	26.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	22.23	Persentase	13.3	26.6	39.90	53.2	66.5	66.50	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	Prosentase Koperasi Berkualitas	22.23	Persentase	20	40	60.00	80	100	100.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18	Persentase	20	40	60.00	80	100	100.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
Program Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Dan	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi	62.8	Persentase	16.75	16.75	16.75	16.75	16.75	83.75	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
UMK	Dana Pemerintah melalui UPDB									
Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN dan PMA) baru	1159	Investor	1.275	1.402	1.54	1.697	1.867	1.87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Skor kepatuhan investor yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM)	95	Nilai	95	96	96.00	97	98	98.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan	Persentase Peningkatan Sumberdaya Lingkung	0	Persentase	100	0	-	0	0	00.00	Dinas Perikanan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
	an Perikanan									
Program Pengembangan Kawasan Budidaya	Persentase Pengembangan Kawasan Budidaya	0	Persentase	20	25	50.00	75	100	100.00	Dinas Perikanan
Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau	Laju Produksi Benih Ikan di BBI	.5	Persentase	5	10	10.00	10	10	10.00	Dinas Perikanan
Program Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan	PENINGKATAN HARGAIKAN DI TPI	8.6	Persentase	1.4	1.5	1.70	1.8	2	2.00	inas Perikanan
Program Peningkatan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	33.27	Kg/Kapita/Th	34.6	35.99	37.41	38.4	40.45	40.45	Dinas Perikanan



Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase Pembudidaya yang lulus CPIB/CBIB (cara pembenihan/budidaya ikan yang baik)	60	Persentase	80	0	-	0	0	-	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0.5	Persentase	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya	Produktivitas Perikanan Budidaya	4.2	Ton/HA	0	4.6	4.9	5.1	5.4	5.40	Dinas Perikanan
Program pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata	Persentase Jumlah kunjungan wisatawan	78	Persentase	82	84	86	88	88	88.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Program pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Peningkatan Jumlah Petani Mandiri	0.97	Persentase	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti pelatihan	0	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program peningkatan produksi dan penerapanteknologi pertanian/perkebunan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Pertanian	2	Persentase	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program peningkatan produksi dan penerapanteknologi peternakan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan	1.5	Persentase	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
Program peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Prosentase Jumlah Sampel yang memenuhi SNI	25	Persentase	5.00	5.00	5.00	5.00	.00	50.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Persentase jumlah hewan sakit yang recovery	30	Persentase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi	Prosentase pelaku industri yang diawasi	20	Persentase	20	20	20	20	20	20.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program perlindungan konsumen dan tertib niaga	Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDK yang diuji	20	Persentase	20	20	20.00	20	20	20.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	OP D
				2019	2020	2021	2022	2023			
Program Perdagangan Dalam Negeri, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, serta Perdagangan Dalam Negeri	5.65	Persentase	5.65	0	-	0	0	5.65	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, serta Perdagangan Dalam Negeri	12.5	Persentase	12.5	0	-	0	0	12.50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Perlindungan Konsumen	Prosentase UTP yang sudah ditera/tera ulang danBDKT yang diuji	100	Persentase	20	40	60.00	80	100	100.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Perdagangan Dalam dan Luar	Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memenuhi standar Tertib	33.81	Persentase	0	33.81	50.71	67.62	85.02	85.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	





Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
wilayah										
Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	85	Persentase	87	89	91	93	95	95	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	85	Persentase	87	89	91	93	95	95	
Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup	IKLH	48.9	Indeks	50	52	54	56	58	58	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	48.9	Indeks	50						

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OP D
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	
Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.										
Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	Indeks	20	25	30	35	40	40	
Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	11	Jumlah	25	35	45	55	62	62	



Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan Daerah Berdasarkan Analisis Kesenjangan Kebijakan serta Pencapaian Program. Berdasarkan analisis kesenjangan kebijakan dan realisasi dari program yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat beberapa kebijakan dan program yang direkomendasikan sebagai berikut.

### 2.3.2. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Tangerang 2019-2023, maka rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk kebijakan pilar pembangunan kependudukan:

Pilar pengendalian kuantitas penduduk

- Kebijakan pengaturan batas minimal usia perkawinan sesuai UU No. 16 tahun 2019 yaitu usia 19 tahun.
- Kebijakan pengaturan jumlah anak dalam keluarga.
- Kebijakan peningkatan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB.
- Kebijakan pelaksanaan layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) sesuai standar minimum.

Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pilar pembangunan keluarga berkualitas:

- Kebijakan peningkatan; penguatan; dan pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas peserta didik;
- Kebijakan pemenuhan; peningkatan; dan pemantapan kualitas sarana prasarana kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah meningkatkan kualitas kependudukan dan keluarga berencana; meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; meningkatkan minat baca masyarakat.

Pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk:

- Kebijakan pembangunan, pemerataan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah menurunkan luasan kawasan kumuh; menurunkan ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah; menurunkan

tingkat pencemaran air, tanah dan udara.

- Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- Kebijakan pengaturan migrasi

Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan:

- Kebijakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

### 2.3.3. Rekomendasi Program Pembangunan Kependudukan

#### A. Pilar peningkatan kualitas penduduk

- Melanjutkan gerakan sekolah menyenangkan dengan fokus pada pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, rehabilitasi dan beasiswa bagi lebih banyak siswa terutama bagi yang tidak mampu;
- Menambah jumlah tenaga pengajar secara merata di berbagai wilayah mengingat salah satu penyebab masalah kualitas pendidikan adalah ketersediaan pengajar;
- Menambah/meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan secara merata, mengingat permasalahan dalam bidang kesehatan salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang rendah;
- Menambah dan optimalisasi alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;
- Memperluas jangkauan jaminan kesehatan agar menyeluruh dan merata terutama bagi masyarakat menengah ke bawah;
- Melakukan penyuluhan dan pendampingan (serta bantuan pangan) secara rutin kepada keluarga miskin. Program ini akan sekaligus mencakup pendidikan gizi, perbaikan gizi, menurunkan angka stunting;
- Melanjutkan program peningkatan kapasitas bagi para tenaga kerja;
- Memperluas informasi bursa lowongan pekerjaan di berbagai media secara langsung maupun tidak langsung untuk menjangkau penduduk yang tidak dapat mengakses secara *online*.

#### B. Pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas

- Pendidikan anak, remaja, dewasa mengenai moral dan agama;

- Pendampingan persiapan pernikahan;
- Pendampingan keluarga.

C. Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Melanjutkan program yang telah dilaksanakan (program keluarga berencana; program pembinaan ketahanan keluarga dan remaja; program pengendalian penduduk; program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri) dan memperluas jangkauan program KB terutama bagi keluarga menengah ke bawah (dilakukan secara partisipatif aktif melibatkan masyarakat).

D. Pilar pengarahannya mobilitas penduduk

- Melanjutkan program pembangunan infrastruktur dasar secara merata. Agar terbangun pusat perekonomian baru secara merata di berbagai wilayah untuk menekan terjadinya migrasi regional atas alasan mata pencaharian;

E. Pilar Penataan Data dan Informasi

- Melanjutkan program yang telah dimulai dan memperluas jangkauan program (program pelayanan administrasi kependudukan; program pelayanan administrasi pencatatan sipil program pengelolaan informasi administrasi; program pengelolaan pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan).
- Mempercepat integrasi sistem informasi terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan agar semua data terkumpul di satu pusat.

### BAB III. PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Proyeksi penduduk berfungsi sebagai titik awal bagi sebagian besar proyeksi yang dibutuhkan di masa depan (kebijakan, anggaran, strategi percepatan dll). Hal ini juga merupakan hal yang penting bagi diskusi mengenai kebijakan. Aspek pokok dari proses kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang timbul dan memasukkan masalah tersebut dalam agenda kebijakan. Mengingat dalam pembangunan, penduduk adalah subjek maupun objek pembangunan, maka penting kita memprediksi berapa jumlah, struktur, maupun persebarannya dalam konteks pembangunan. Kemampuan prediktif dari proyeksi penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan prediktif sebuah analisis dampak kependudukan maupun pembangunan, proyeksi penduduk digunakan untuk mengilustrasikan seberapa besar masalah ke depan. Selain itu, proyeksi penduduk juga diperlukan pada proses kebijakan yang membutuhkan proposal dalam menyelesaikan permasalahannya.

Dalam kasus ini, proyeksi penduduk menyajikan seberapa besar pelayanan yang dibutuhkan untuk solusi dan perubahan yang diajukan pada indikator berbasis populasi yang akan dihasilkan. Kebutuhan akan proyeksi penduduk untuk melihat ukuran dan komposisi penduduk di masa depan dilandasi oleh dua asumsi. Pertama, proyeksi berdasarkan asumsi mengenai level fertilitas, mortalitas dan migrasi di masa depan. Karena asumsi ini sederhana maka dipertimbangkan adanya varian rendah, medium dan tinggi dari tiap asumsi sehingga dapat ditentukan kisaran proyeksi yang masuk akal. Kedua, ketika hasil proyeksi penduduk dimasukkan dalam proyeksi kebijakan yang akan diambil, sangatlah penting untuk menampilkan bagaimana proyeksi akan berdampak terhadap situasi kependudukan.

Dalam menyusun proyeksi terdapat delapan langkah, yaitu :

1. Menentukan prioritas masalah-masalah kependudukan (misalnya: jumlah penduduk yang terlalu besar, perencanaan Program KB, perencanaan tata ruang dan pemukiman, penguatan ketahanan pangan, penguatan layanan kesehatan dasar, permasalahan sanitasi dan pengelolaan sampah.
2. Menentukan wilayah geografis yang akan disusun proyeksinya.
3. Menentukan periode proyeksi. Periode proyeksi dimulai pada tahun dasar hingga pada tahun tertentu yang ditetapkan. Tahun dasar umumnya dipilih berdasarkan keberadaan data, seperti tahun

sensus terbaru atau survei skala besar. Periode proyeksi disesuaikan dengan kebutuhan proyeksi.

4. Mengumpulkan data. Pengumpulan data sangat penting dalam proses proyeksi. Data harus valid (mencerminkan kondisi populasi), reliabel (dikeluarkan dari sumber yang dapat dipercaya), dan up to date untuk menjamin kualitas hasil proyeksi.

Data kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi antara lain berikut:

- a) Data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin periode terakhir;
- b) Data kelahiran total sekurang-kurangnya dua periode dan data kelahiran menurut kelompok umur ibu periode terakhir;
- c) Data kematian dan kematian bayi menurut jenis kelamin sekurang-kurangnya dua periode; dan
- d) Data migrasi netto menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin pada periode terakhir.
- e) Data kependudukan sebagaimana dimaksud bersumber dari data registrasi, sensus atau survey. Persyaratan penggunaan data registrasi sebagaimana dimaksud dapat digunakan apabila cakupannya paling sedikit mencapai 80%.

5. Menetapkan asumsi.

Proyeksi mensyaratkan adanya perkiraan-perkiraan yang disusun berdasarkan asumsi yang mendasari keadaan di masa mendatang.

- a) Konsultasi dengan para pakar terkait;
- b) Mempelajari referensi atau dokumen-dokumen nasional, khusus dalam menetapkan asumsi target pencapaian proyeksi;
- c) Mempelajari data proyeksi yang dihasilkan oleh instansi/pihak lain;
- d) Mempelajari dokumen atau data proyeksi yang memiliki kemiripan dengan wilayah yang akan dijadikan lokus proyeksi.

6. Menggunakan Aplikasi. Pada saat data tahun dasar dan kebijakan/keputusan yang berkaitan dengan asumsi-asumsi proyeksi telah ditetapkan, program Spectrum dapat digunakan untuk mengolah data dan membuat proyeksi-proyeksi yang dibutuhkan, panduan aplikasi spectrum dapat diunduh pada <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?p=18>. Atau aplikasi lain yang lazim digunakan untuk proyeksi penduduk.

7. Menganalisis hasil proyeksi dari aplikasi hasil proyeksi perlu dianalisis dan dibandingkan dari berbagai asumsi untuk menyusun kebijakan yang sesuai.

8. Diseminasi hasil proyeksi. Setelah disusun, hasil proyeksi sebaiknya didiseminasikan kepada pemangku kebijakan. Secara khusus, presentasi proyeksi tersebut dapat mendorong terlaksananya dialog kebijakan berkaitan dengan permasalahan strategis.

Tahapan akhir dalam penyusunan proyeksi penduduk adalah menyepakati hasil proyeksi dan analisis proyeksi indikator/parameter kependudukan pada masing-masing pilar. Kesepakatan tersebut dapat berupa penandatanganan dokumen hasil proyeksi yang melibatkan sektor terkait dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan.



Gambar 3.1. Hubungan Antara Lima Pilar GDPK

Dengan menggunakan cara berpikir sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.1, maka pembangunan kependudukan di Indonesia paling tidak harus melibatkan lima pilar tersebut. Tetapi tetap membuka kemungkinan untuk mengembangkannya secara lebih luas.

Dalam penyusunan GDPK Kabupaten Tangerang, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang akan turut memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi serta program capaian SDGs. Dengan keterpautan dan sinkronisasi ini diharapkan GDPK 5 Pilar Kabupaten Tangerang akan menjadi rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.

### 3.1. Kondisi Kependudukan Kabupaten Tangerang Saat Ini

#### 3.1.1. Kuantitas Penduduk

Dalam banyak tulisan disebutkan bahwa salah satu masalah kependudukan klasik di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan saat ini menduduki peringkat keempat tertinggi di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi bahwa jumlah yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang memadai akan menjadi “beban” pembangunan, maka kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk memperoleh justifikasinya. Pada waktu yang bersamaan, kebijakan tersebut disertai dengan usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mengubah “beban” menjadi “aset” pembangunan.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan presentase penduduk terbanyak di Provinsi Banten, yaitu sebesar 27.26%. Namun, presentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (29.40%). Tahun 2020 tercatat 3,057,599 jiwa yang terdiri atas

1,556,524 jiwa laki-laki (50.91%) dan 1,501,075 jiwa perempuan (49.09%). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang berada di posisi kedua (2.93%) setelah Kota Tangerang Selatan (3.04%). Wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pasar Kemis sebesar 249.216 jiwa (8.15% dari total penduduk Kabupaten Tangerang) dan jumlah paling sedikit di Kecamatan Mekar Baru, yaitu 40.249 jiwa (1.32% dari total penduduk Kabupaten Tangerang).

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan tertentu. Selain memiliki jumlah penduduk terbanyak, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pasar Kemis juga paling tinggi di Kabupaten Tangerang, yaitu 9,614.81 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang adalah 3,382.71 jiwa/km<sup>2</sup> dan beberapa daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah dari rata-rata tersebut, antara lain Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Mekar Baru, Gunung Kaler, Jambe, Pagedangan, Pakuhaji, Sindang Jaya, Sukamulya, Sukadiri, Kresek, Jayanti, Cisauk, Rajeg, Solear, Tigaraksa, Cisoka, dan Legok.

Tabel 3.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

KECAMATAN	KEPADATAN PENDUDUK		
	2018	2019	2020
01-BALARAJA	1029,738	1077,265	1129,499
02-JAYANTI	571,6329	601,8772	638,081
03-TIGARAKSA	1223,033	1299,762	1398,6

04-JAMBE	404,41	432,6281	463,8856
05-CISOKA	714,0644	759,2968	822,0501
06-KRESEK	586,472	622,6758	671,1263
07-KRONJO	530,9595	566,0608	643,4446
08-MAUK	736,7998	772,6162	822,8844
09-KEMIRI	386,5018	413,5876	448,6889
10-SUKADIRI	533,5816	565,8522	616,6865
11-RAJEG	1242,223	1344,041	1496,752
12-PASAR KEMIS	2137,068	2222,05	2324,017
13-TELUKNAGA	1203,129	1340,197	1502,563
14-KOSAMBI	958,9094	977,2348	1048,54
15-PAKUHAJI	970,8582	1042,878	1139,631
16-SEPATAN	872,0799	926,3111	1004,887
17-CURUG	1455,87	1527,175	1617,551
18-CIKUPA	1863,409	1930,87	1987,694
19-PANONGAN	971,3349	1033,731	1106,764
20-LEGOK	930,0656	997,0799	1068,027
22-PAGEDANGAN	792,64	856,9726	922,4076
23-CISAUK	659,4458	706,2574	756,615
27-SUKAMULYA	577,1454	610,3397	653,1883
28-KELAPA DUA	1363,2	1438,588	1512,455
29-SINDANG JAYA	721,8713	774,9702	823,8975
30-SEPATAN TIMUR	775,9535	846,2753	927,056
31-SOLEAR	693,9213	750,4172	820,6198
32-GUNUNG KALER	434,118	467,4613	514,2431
33-MEKAR BARU	314,6007	350,1788	400,9237
JUMLAH	897,2218	953,1643	1024,093

Sumber : Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Permasalahan penduduk di Kabupaten Tangerang adalah terkait dengan tingkat persebaran penduduk yang belum merata. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepadatan penduduk dimana mayoritas penduduk Kabupaten Tangerang di kecamatan pasar kemis, cikupa dan curug. Pada ketiga daerah tersebut, tingkat kepadatan penduduk telah mencapai jutaan per km<sup>2</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan masih berorientasi pada ketiga kecamatan tersebut sehingga dapat dengan mudah menarik penduduk yang berada didaerah.

Kondisi demikian menjadikan daerah dengan kepadatan penduduk yang banyak dapat dengan mudah memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik jika dibandingkan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk sedikit. Disisi lain, konsekuensi kepadatan penduduk yang banyak menimbulkan berbagai masalah sosial yang akan ditimbulkan.



Tabel 3.2 Prosentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang, 2018-2020

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				Persentase Pertumbuhan Penduduk (%)		
	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01-BALARAJA	106.022	108.933	109.842	117.380	2,75	0,83	6,86
02-JAYANTI	57.176	58.973	60.135	65.170	3,14	1,97	8,37
03-TIGARAKSA	126.890	132.988	138.130	150.766	4,81	3,87	9,15
04-JAMBE	41.573	43.332	44.965	49.584	4,23	3,77	10,27
05-CISOKA	73.621	76.753	79.765	87.138	4,25	3,92	9,24
06-KRESEK	58.880	59.450	61.594	66.584	0,97	3,61	8,10
07-KRONJO	57.503	50.845	51.811	59.306	-11,58	1,90	14,47
08-MAUK	77.994	78.846	79.511	85.056	1,09	0,84	6,97
09-KEMIRI	41.314	40.696	42.809	47.029	-1,50	5,19	9,86
10-SUKADIRI	54.541	55.585	57.055	61.271	1,91	2,64	7,39
11-RAJEG	129.389	137.272	141.480	160.779	6,09	3,07	13,64
12-PASAR KEMIS	224.182	235.262	233.810	249.216	4,94	-0,62	6,59
13-TELUKNAGA	127.801	129.058	135.682	154.533	0,98	5,13	13,89
14-KOSAMBI	103.081	102.255	99.301	107.258	-0,80	-2,89	8,01
15-PAKUHAJI	100.014	101.356	104.860	116.025	1,34	3,46	10,65
16-SEPATAN	88.399	90.761	93.337	103.716	2,67	2,84	11,12
17-CURUG	145.697	152.008	152.411	165.667	4,33	0,27	8,70
18-CIKUPA	183.265	188.679	189.643	202.372	2,95	0,51	6,71
19-PANONGAN	98.608	104.097	108.371	118.687	5,57	4,11	9,52
20-LEGOK	99.721	101.298	106.060	115.935	1,58	4,70	9,31
22-PAGEDANGAN	84.857	86.768	88.649	98.591	2,25	2,17	11,22
23-CISAUK	70.868	71.996	74.250	82.497	1,59	3,13	11,11
27-SUKAMULYA	60.178	60.975	61.840	67.943	1,32	1,42	9,87
28-KELAPA DUA	144.940	148.820	151.513	160.803	2,68	1,81	6,13
29-SINDANG JAYA	76.156	77.734	80.991	87.738	2,07	4,19	8,33
30-SEPATAN TIMUR	80.482	83.379	86.987	97.347	3,60	4,33	11,91
31-SOLEAR	74.667	75.061	79.600	88.267	0,53	6,05	10,89
32-GUNUNG KALER	45.696	43.231	45.659	50.692	-5,39	5,62	11,02
33-MEKAR BARU	34.855	32.243	34.908	40.249	-7,49	8,27	15,30
JUMLAH	2.668.370	2.728.654	2.794.969	3.057.599	2,26	2,43	9,40

Sumber : Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2018- 2020 terus mengalami peningkatan sebesar 262.630 jiwa atau tumbuh sebesar 9,40%. Komposisi penduduk Kabupaten Tangerang selama tiga tahun (2018-2020) didominasi oleh laki-laki. Kondisi tersebut menggambarkan kecukupan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat bekerja dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi Kabupaten Tangerang.

Tabel 3.3 Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang

KECAMATAN	JENIS KELAMIN (KK)					
	LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01-BALARAJA	29.803	31.019	31.449	4.755	5.134	6.457
02-JAYANTI	16.116	16.911	17.207	3.068	3.288	4.207
03-TIGARAKSA	35.666	37.792	39.182	5.379	5.828	7.755
04-JAMBE	11.617	12.434	12.770	1.955	2.085	2.798
05-CISOKA	20.281	21.484	22.216	3.683	3.998	5.372
06-KRESEK	16.331	17.346	17.642	3.351	3.551	4.881
07-KRONJO	14.312	15.415	16.124	3.507	3.582	5.470
08-MAUK	20.974	21.912	22.261	3.753	4.017	5.355
09-KEMIRI	10.618	11.354	11.646	2.353	2.526	3.412
10-SUKADIRI	15.515	16.409	16.864	2.392	2.581	3.832
11-RAJEG	37.077	39.867	42.375	4.612	5.239	7.856
12-PASAR KEMIS	63.526	65.679	66.220	8.194	8.893	11.774
13-TELUKNAGA	35.317	39.209	41.144	5.060	5.768	9.282
14-KOSAMBI	27.752	28.059	28.610	4.429	4.737	6.579
15-PAKUHAJI	28.600	30.543	31.775	3.982	4.456	6.471
16-SEPATAN	25.342	26.955	27.853	3.925	4.132	5.871
17-CURUG	42.082	44.048	44.980	6.777	7.204	9.305
18-CIKUPA	53.713	55.640	55.896	8.823	9.160	10.811
19-PANONGAN	28.772	30.534	31.586	3.826	4.158	5.557
20-LEGOK	27.278	29.126	29.841	3.935	4.336	6.002
22-PAGEDANGAN	23.154	24.787	25.636	3.447	3.973	5.320
23-CISAUK	19.227	20.428	21.071	2.904	3.274	4.321
27-SUKAMULYA	16.670	17.559	17.980	2.699	2.924	3.941
28-KELAPA DUA	39.162	40.994	41.669	6.587	7.285	9.089
29-SINDANG JAYA	21.274	22.710	23.238	2.952	3.298	4.412
30-SEPATAN TIMUR	22.978	24.922	25.942	3.063	3.479	5.170
31-SOLEAR	19.925	21.433	22.485	3.363	3.751	5.055
32-GUNUNG KALER	12.039	13.006	13.439	2.530	2.682	3.819
33-MEKAR BARU	8.808	9.790	10.226	1.750	1.962	3.229
JUMLAH	743.929	787.365	809.327	117.054	127.301	173.403

Sumber : Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

### 3.1.2. Proyeksi Penduduk Kabupaten Tangerang

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang selama beberapa tahun mendatang meningkat, yaitu dari 2.668.370 juta pada 2017 menjadi 5.003.744 penduduk tahun 2035. Proyeksi Penduduk merupakan perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.

Penghitungan proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang menggunakan rumus Postcensal estimated adalah perkiraan penduduk setelah dilakukan sensus.

$$P_m = P_o + \frac{(n+m)}{n} (P_n - P_o)$$

atau 
$$P_m = P_n + \frac{m}{n} (P_n - P_o)$$

$P_m$  : jumlah penduduk pada tahun yang diestimasi (tahun  $m$ )  
 $P_n$  : jumlah penduduk pada tahun  $n$   
 $P_o$  : jumlah penduduk pada tahun (penduduk dasar) awal  
 $m$  : selisih tahun yang dicari dengan tahun  $n$   
 $n$  : selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui

### 3.1.2.1. Kualitas Penduduk

#### a. Pendidikan

Salah satu masalah penting pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi murni di tingkat SLA dan perguruan tinggi (PT). Secara nasional, tingkat SD sudah hampir 95 persen dan SLP hampir 80,12 persen. Dengan program wajib belajar 12 tahun tampaknya masalah tersebut akan segera teratasi. Sementara, secara kabupaten untuk APM tingkat SD/MI di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sudah mencapai 98,87 persen. Untuk tingkat SMP/MTs sebesar 81,62 persen, dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 54,94 persen. Hal ini menggambarkan rendahnya akses penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi (PT). Akses penduduk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akses ekonomi dan akses fisik.

Keterbatasan akses secara ekonomi terutama terjadi pada penduduk miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan di jenjang PT. Keterbatasan akses dari sisi fisik mengacu kepada keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis. Sementara itu, dilihat dari rata-rata tahun sekolah (mean years of schooling) Indonesia tergolong masing rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Kondisi ini merupakan indikasi besarnya jumlah murid yang drop out dari pendidikan SD atau SLP. Sekali lagi hal ini terkait dengan persoalan akses terutama akses ekonomi.

Pendidikan Indonesia juga berhadapan dengan tantangan untuk meningkatkan kompetensi dan kompetisi penduduk. Berhadapan dengan globalisasi peningkatan daya kompetensi dan kompetisi menjadi salah satu kunci. Hal ini sekaligus untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang menurut

pendidikan, pendidikan penduduk Kabupaten Tangerang masih didominasi dari lulusan SLTA. Sementara pendidikan penduduk yang mencapai gelar doktor (S3) masih sangat sedikit. Kecamatan Kepala Dua merupakan kecamatan tertinggi yang memiliki penduduk lulusan doktor (S3) yakni sebesar 1.769 penduduk. Sementara, kecamatan Curug merupakan kecamatan yang memiliki penduduk lulusan SLTA tertinggi mencapai 58.015 penduduk. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan dan membangun Kabupaten Tangerang, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang harus memperhatikan faktor pendidikan. Semakin banyak penduduk Kabupaten Tangerang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki dampak pada pemangunan daerahnya.

b. Kesehatan

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui edukasi terhadap ibu tentang pentingnya menjaga kondisi kehamilan dan imunisasi menjadi kunci suksesnya rendahnya bayi yang lahir dengan berat badan rendah maupun gizi buruk.

Tabel 3.4 Gambaran Status Gizi Pada Balita Di

Tahun	Jumlah Balita							
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2014	1172	0.45	8583	3.28	249877	95.55	1892	0.72
2015	1.091	0,39	8.099	2,86	271.407	95,89	2.227	0,79
2016	1.164	0,41	8.935	3,17	268.339	95,32	2.880	1,03
2017	1.161	0,38	9.644	3,14	294.027	95,69	2.479	0,81
2018	1.040	0,33	7.863	2,51	296.092	94,66	2134	0,68
2019	870	0,22	2959	2,74	32680	82,1	3296	0,83

Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2019

Sumber : RKPDP Kabupaten Tangerang, 2021

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2019 di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumber daya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dan Keramas, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.

Tabel 3.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tangerang tahun 2020

N O	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKA T			KESEHATAN LINGKUNGA N			GIZ I		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Puskesmas Balaraja		4	4		1	1		2	2
2	Puskesmas Gembong			1			1			1
3	Puskesmas Jayanti			1			1			1
4	Puskesmas Tigaraksa			1			0			1
5	Puskesmas Pasir Nangka			1			1			0
6	Puskesmas Jambe			1			1			1
7	Puskesmas Cisoka			1			1			1
8	Puskesmas Kresek			1			0			1
9	Puskesmas Kronjo			1			0			1
10	Puskesmas Mauk			1			1			2
11	Puskesmas Kemiri			1			0			1
12	Puskesmas Sukadiri			1			1			1
13	Puskesmas Rajeg			1			1			1
14	Puskesmas Sukatani			1			0			1
15	Puskesmas Kutabumi			1			1			1
16	Puskesmas Pasar Kemis			1			1			0
17	Puskesmas Teluknaga			1			1			2
18	Puskesmas Tegal angus			1			1			1
19	Puskesmas Kosambi			1			2			1
20	Puskesmas Salembaran Jaya			1			0			1
21	Puskesmas Pakuhaji			1			0			1
22	Puskesmas Sukawali			1			1			1
23	Puskesmas Sepatan			1			1			2
24	Puskesmas Curug			1			1			2
25	Puskesmas Binong			1			1			1
26	Puskesmas Cikupa			1			1			2
27	Puskesmas Pasir Jaya			1			1			0
28	Puskesmas Panongan			1			0			2
29	Puskesmas Legok			1			2			1
30	Puskesmas Bojong Kamal			1			1			1
31	Puskesmas Caringin			1			1			0
32	Puskesmas Pagedangan			1			0			1
33	Puskesmas Cisauk	0	0	1	0	1	1	0	0	1
34	Puskesmas Suradita			1			1			1
35	Puskesmas Sukamulya			1			0			1
36	Puskesmas Kelapa Dua			1			0			2
37	Puskesmas Jl.Emas			1			2			2
38	Puskesmas Jl.Kutai			1			1			1
39	Puskesmas Bojong Nangka			1			1			1
40	Puskesmas Sindang Jaya			1			0			1
41	Puskesmas Kedaung Barat			1			0			2
42	Puskesmas Cikuya			1			1			0

N O	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKA T			KESEHATAN LINGKUNGA N			GIZ I		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Puskesmas Gunung Kaler			1			0			1
44	Puskesmas Mekar Baru			1			1			1
1	RSU Tangerang	3	4	7	1	2	3	1	5	6
2	RSUD Balaraja	0	0	0	2	2	4	0	5	5
3	RSUD Pakuhaji	0	0	0	0	1	1	0	4	4
4	Siloam Hospitals Lippo Village	0	1	1	0	1	1	0	11	11
5	Bethsaida Hospital			0			0			0
6	Ciputra Hospital	0	7	7	0	0	0	0	6	6
7	METRO HOSPITALS CIKUPA	0	9	9	0	0	0	0	2	2
8	RS St. Carolus Summarecon	0	0	0	0	1	1	0	4	4
9	RS Qadr	1	10	11	0	0	0	0	0	0
10	RS Permata Hati			0			0			0
11	RS Hermina Bitung	0	0	0	1	0	1	1	0	1
12	RS Mitra Keluarga Gading Serpong	0	0	0	0	1	1	0	4	4
13	RS Murni Asih	0	0	0	1	0	1	0	14	14
14	RS Siloam Kelapa Dua			0			0			0
15	RS Keluarga Kita	0	0	0	0	1	1	0	1	1
16	RS Selaras			0			0			0
17	RS Suci Paramita			0			0			0
18	RS Mitra Husada	2	0	2	0	1	1	0	1	1
19	RSIA Selaras			0			0			0
20	RSIA Tiara	1	0	1		1	1	0	1	1
21	RSIA Bunda Sejahtera			0			0			0
22	RSIA Harapan Mulia	0	0	0	0	1	1	0	1	1
23	RS BUN	0	1	1	0	1	1	0	1	1
24	RSIA Ilanur	0	1	1	0	0	0	0	1	1
25	RSIA Sepatan Mulia	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0			0			0
	KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0			0			0
	KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			0			0			0
	JUMLAH (KAB/KOTA)a			0			0			0
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			0,0			0,0			0,0

Sumber : Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

### c. Ekonomi

#### 1. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Jumlah penduduk secara nasional tahun 1971 sekitar 118,3 juta, meningkat menjadi 237,6 juta tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi 270.20 juta jiwa di tahun 2020. Angka pertumbuhan penduduk periode 1971-1980 adalah 2,32 persen per tahun. Menurun menjadi 1,49 persen per tahun pada periode 2000-2010 dan menurun kembali menjadi 1.31 persen pada periode 2010-2019.

Persebaran penduduk antara Jawa dan Luar Jawa sangat timpang. Pada 1971 sekitar 64,2 persen penduduk bertempat tinggal di Jawa, menurun menjadi 59,1 persen tahun 2010 dan menurun kembali menjadi 21,3 persen di tahun 2020. Ketimpangan ini menyebabkan terkurasnya sumber daya alam atau daya dukung lingkungan di Jawa. Sebaliknya, sumber daya alam yang ada di Luar Jawa kurang dimanfaatkan secara optimal karena kekurangan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, proyeksi penduduk Tangerang juga mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. tercatat, tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 2.852.182 meningkat menjadi 3.908.880 penduduk atau tumbuh 27 persen.

Dilihat menurut struktur umur, penduduk usia kerja (15+) menurut status pekerjaan utama tahun 2010 sebesar 74,6 persen atau 108,20 juta. Adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15+) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 sebesar 5,4 juta penduduk menjadi 5,6 juta penduduk, berdampak pada peningkatan jumlah penduduk usia kerja meningkat secara nasional menjadi 131,064 juta (2020) dan akan meningkat kembali menjadi 243,0 juta tahun 2035.

Dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nasional 67.77 persen (BPS, 2021), sementara TPAK Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencapai 64,48 persen, maka jumlah angkatan kerja yang tahun 2020 mencapai 138,22 juta akan bertambah menjadi 168,2 juta tahun 2035. Dengan kontribusi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang sebesar 13,06 persen di tahun 2020, maka TPT nasional pada tahun 2020 mencapai 7.07 persen dan angka setengah pengangguran hanya 10.19 persen, maka jumlah pengangguran terbuka sekitar 9,77 juta meningkat menjadi 11,3 juta tahun 2035.

Apabila pemerintah dan swasta nasional berhasil memperluas kesempatan kerja sebanyak 50 persen hingga 2035, maka jumlah pengangguran terbuka dan pekerja setengah penganggur masih sekitar 30 juta penduduk. Hal ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru. Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan

kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja baru. Setiap tahun pertambahan jumlah angkatan kerja diperkirakan 2 juta sehingga untuk mempertahankan jumlah pengangguran terbuka pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya ada tuntutan penambahan kesempatan kerja. Jika targetnya adalah penurunan jumlah pengangguran terbuka, maka kesempatan kerja yang diciptakan harus lebih besar dari pada jumlah angkatan kerja baru.

Tabel 3.6. Persentase Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang 2010-2020

Kabupaten/Kota	Angka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab Tangerang (%)	14.01	14.42	11.46	11.94	8.45	9.00	-	10.57	9.63	8.92	13.06
Kab Tangerang (jiwa)									162120	161671	239788

Sumber : BPS Banten, 2021

## 2. Kemiskinan

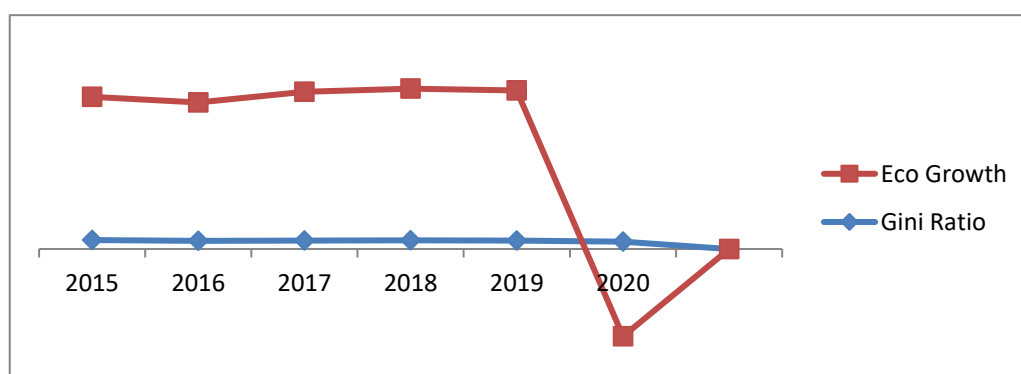
Karakteristik rumah tangga atau penduduk miskin, antara lain berada pada keadaan 4L, yaitu the last, the least, the lowest, dan the lost atau mereka yang tercecer di belakang. Menurut Bappenas (2007), batasan kemiskinan adalah sekelompok orang atau seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Hak-hak dasar, antara lain, adalah terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan air bersih, merasa aman dari tindak kekerasan, serta mempunyai hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Konsep operasional kemiskinan model Bappenas tersebut sebagian sulit diukur sehingga perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah dengan pendekatan makro dan dilakukan oleh BPS dengan data sampel dari Susenas modul konsumsi. Hasil perhitungan menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin serta tidak dapat menunjukkan siapa dan lokasi penduduk miskin. Metode ini dilakukan sejak 1984 sampai sekarang.

Permasalahan lain yang dihadapi Indonesia adalah bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tinggi diikuti oleh peningkatan kesenjangan. Salah satu indikatornya adalah kenaikan gini rasio. Data BPS (2021) menunjukkan bahwa rasio gini mencapai -2,19 persen di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dari tahun 2010 sampai dengan 2015 gini ratio cenderung mengalami peningkatan, sebaliknya pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2010 hingga 2015



mengalami penurunan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2010 sebesar 6,22 persen dan terus menurun sampai tahun 2015 mencapai 4,88 persen. Meskipun demikian, perbaikan pertumbuhan ekonomi terlihat mulai dari 2016 yang meningkat menjadi 5,03 persen dan meningkat terus setelahnya sampai tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen. Namun, adanya pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi Secara nasional, rata-rata rasio gini di perkotaan selalu mengalami peningkatan sementara di pedesaan fluktuatif. Tahun 2012, 2013 dan 2014 misalnya, rasio gini di perkotaan sebesar 0.425 pada tahun 2012 dan naik menjadi 0.431 pada tahun 2013 dan naik kembali menjadi 0.433 di 2014. Sebaliknya di pedesaan, rasio gini nya mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar 0.327, turun menjadi 0,320 di 2013. Namun, pada tahun 2014, naik menjadi 0.334. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang juga fluktuatif. Tercatat, tahun 2015, ekonomi Tangerang tumbuh sebesar 5,6 persen dan turun menjadi 5,41 persen di tahun 2016. Dua tahun setelahnya mengalami peningkatan kenaikan menjadi 5,82 persen (2017) dan 5,93 persen (2018). Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Maret 2020 berakibat pada turunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang secara drastis, yakni mencapai -3.7 persen. Sementara rasio gini Kabupaten Tangerang stagnan di angka 0.3 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan mengalami penyempitan di tahun 2020 menjadi 0,285. Ketimpangan pendapatan adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Disamping itu, ketimpangan merupakan sumber dari instabilitas sosial dan politik, sehingga tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam waktu yang bersamaan menurunkan ketimpangan.



Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2020

Gambar 3.2 Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

Tabel 3.7. Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tangerang 2010-2020

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab Tangerang	7.18	6.42	5.71	5.78	5.26	5.71	5.29	5.39	5.18	5.14	6.23

Sumber : BPS Banten, 2021

Pemerintah dalam visi 2025 menargetkan PDB mencapai 3,8-4,5 triliun dolar AS dengan pendapatan per kapita 13.000-16.000 dolar AS dari 3000 dolar AS pada tahun 2010 dan 3500-3600 dolar AS di tahun 2011.

Pada tahun 2015 ditargetkan pendapatan per kapita akan meningkat menjadi 5500 dolar AS. Jika target ini dijadikan dasar untuk menentukan pencapaian tahun 2035, tampaknya sulit dilakukan, terlebih pada situasi pandemi Covid-19 ini dimana semua negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan sampai minus. Untuk mencapai ini perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi (kurang lebih 10 persen pertahun). Angka paling realistis adalah bahwa tahun 2035 GNI per kapita penduduk Indonesia berkisar antara 8000- 9000 dolar AS.

Terdapat isu yang lebih penting dari sekedar kenaikan pendapatan per kapita, yaitu pemerataan pendapatan. Pada 2020, gini ratio nasional berada pada kisaran 0,385, artinya tidak berubah banyak dari kondisi terakhir tahun 2010 (0.378). Sementara, untuk Kabupaten Tangerang sebesar 0,285 pada tahun 2020 dan 0,39 di tahun 2011. Angka ini harus ditekan serendah mungkin tahun 2035 agar kesenjangan pendapatan yang merupakan salah satu sumber kemiskinan dapat ditekan. Tahun 2018, untuk pertama kalinya prosentase kemiskinan Indonesia berhasil mencapai satu digit, yakni sebesar 9,82%. Artinya selama satu tahun sebelumnya pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.3 persen dari sebelumnya 10,12% (2017). Namun dengan adanya pandemi Covid-19, prosentase kemiskinan nasional kembali meningkat dan mencapai 10,19% di tahun 2020. Tidak berbeda, prosentase kemiskinan Kabupaten Tangerang juga mengalami kenaikan, dari 5,14 persen di tahun 2019 menjadi 6,23 persen pada 2020. Jika kondisi pandemi ini masih belum teratasi dengan baik, maka mustahil untuk mengharapkan prosentase kemiskinan tahun 2035 mencapai 5-7 persen dari yang ditargetkan.

### 3. Ketahanan Pangan

Pembahasan kebutuhan dasar makanan dan minuman mencakup satu dari 52 komoditas saja, yaitu beras. Kebutuhan

pangan beras dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas (KHP), yaitu 10 kg beras per kapita per bulan atau 120 kg beras per kapita per tahun. Pada 2011 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah mencapai 242 juta, tahun 2020 sebesar 270,20 juta, dan tahun 2035 diperkirakan mencapai 307,2 juta. Menggunakan kriteria tersebut, maka kebutuhan pangan beras di tahun 2020 sekitar 2.702 juta kg per bulan atau 32.424 juta kg per tahun. Jumlah ini akan meningkat menjadi 3.072 juta kg per bulan atau 36.864 juta kg per tahun di tahun 2035. Sementara, untuk Kabupaten Tangerang kebutuhan pangan beras mencapai 28.5 juta kg per bulan atau 342.2 juta kg per tahun di tahun 2010. naik menjadi 39,08 juta kg per bulan atau 469,06 juta kg per tahun.

Ini baru kebutuhan pangan beras, belum termasuk kacang, kedelai, jagung, gula, garam, ikan, daging, dan lain-lain. Persediaan beras sebagai pangan nasional menurun akibat dari berbagai hal, seperti penyusutan lahan pertanian pangan menjadi peruntukan non pangan, gagal panen karena hama dan penyakit, serta musim kemarau yang panjang.

Solusi paling mudah adalah mengimpor beras yang banyak menguras devisa negara. Jika pengendalian jumlah penduduk gagal, maka perkiraan jumlah beras tersebut yang akan muncul. Kebijakan penciptaan tanah pertanian pangan yang baru di Jawa-Madura sangat sulit dilakukan, dan yang terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi tempat tinggal, industri, dan jasa. Memperlambat cepatnya penyusutan lahan pertanian dalam jangka panjang sampai 2035 agaknya sulit dilakukan, tetapi harus dilakukan. Penciptaan lahan pertanian baru di luar Jawa adalah pilihan utama sambil mempelajari kegagalan pencetakan lahan pertanian sejuta hektar di Kalimantan. Pemberian subsidi pupuk, bibit unggul lokal, pestisida, dan infrastruktur irigasi teknis wajib dilakukan.

Perlu juga dilakukan perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan pemberdayaan upah sekaligus mengerem urbanisasi desa-kota. Apabila beberapa hal tersebut gagal dilaksanakan, ada kemungkinan Indonesia akan tetap menjadi pengimpor produk pertanian terbesar di dunia. Hal yang sama juga terjadi dalam hal negara pengimpor garam yang cukup besar jumlahnya, padahal Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Adanya kondisi tingkat APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Tangerang yang masih berada pada angka sekitar 50%, angka pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, serta ketahanan pangan utamanya beras yang masih menggantungkan pada impor, mengisyaratkan

pemerintah Kabupaten Tangerang wajib memperhatikan kualitas penduduknya. Masalah kependudukan adalah masalah yang tidak akan pernah selesai dengan baik jika hanya satu masalah yang satu di atasi. Artinya butuh koordinasi dan sinergi yang kuat antar Kementrian/Lembaga/Institusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi. Sebagai contoh, jika fertilitas bisa ditekan dan kematian dikurangi, maka jumlah penduduk lanjut usia juga akan meningkat, dan selanjutnya membutuhkan penanganan khusus. Berdasarkan analisis penduduk menurut kelompok umur maka permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tangerang adalah bagaimana menurunkan angka fertilitas dan meningkatkan kualitas serta kesejahteraan penduduknya. Sehingga untuk mencapai target SDGs, yakni angka kematian balita sebesar 25 kematian per 1000 kelahiran hidup bukan hal yang mustahil, asalkan kesehatan balita diperhatikan sehingga terhindar dari gizi buruk dan penyakit beresiko kematian.

#### 3.1.2.2. Hasil proyeksi angkatan kerja Kabupaten Tangerang

Hasil proyeksi penduduk yang juga dapat dicermati terkait dengan perencanaan sektoral adalah jumlah penduduk usia anak, usia remaja, usia produktif, dan usia lansia. Program pembangunan yang relevan dengan hasil tersebut adalah sektor pendidikan, tenaga kerja, ketahanan pangan, perumahan, dan sebagainya. Ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan kependudukan. Berdasarkan proyeksinya, jumlah angkatan kerja menjadi 2.133.662 orang pada tahun 2035.

#### 3.1.3. Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga (Friedman, 1998) sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagian besar keluarga di Kabupaten Tangerang masih belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang

kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8. Jumlah Keluarga menurut Kabupaten/Kota dan klasifikasi Keluarga di Provinsi Banten 2018

Kabupaten Tangerang	2018	2019	2020
Keluarga Pra sejahtera	109.620	109.242	109.242
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.90	90.97	90.98

Tabel 3.8 menunjukkan jumlah kepala keluarga (KK) Kabupaten Tangerang yang masuk dalam kategori pra sejahtera mengalami penurunan sebesar 378 KK di tahun 2019. Namun meski mengalami penurunan, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Tangerang menempati posisi tertinggi se-Provinsi Banten, sementara posisi kedua ditempati Kabupaten Pandeglang selanjutnya Lebak dan Serang. Tingginya jumlah keluarga Pra Sejahtera bisa menjadi nilai lebih bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk lebih memantapkan program daerahnya guna mendukung program pusat yang menargetkan 0 (nol) persen kemiskinan di tahun 2024.

Tingginya jumlah KK Pra sejahtera dan sejahtera di Kabupaten Tangerang didukung karena jumlah KK berdasarkan jenis pekerjaan ditempati oleh status bekerja sebagai PNS/TNI/Polri, Petani dan Pegawai Swasta (tabel 3.9).

Tabel 3.9. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan, 2018

Kabupaten/Kota	Bekerja (%)							
	Petani	Nelayan	Pedagang	PNS/TNI/Polri	Pegawai Swasta	Wiras swasta	Pensiunan	Pekerja Lepas
Pandeglang	31.23	1.87	5.06	7.68	26.76	1.89	14.31	11.22
Lebak	108.488	0.51	3.81	7.26	18.94	1.53	22.52	13.16
<b>Tangerang</b>	<b>17.911</b>	<b>1.16</b>	<b>5.31</b>	<b>37.94</b>	<b>17.16</b>	<b>3.55</b>	<b>22.47</b>	<b>9.31</b>
Serang	43.768	1.35	5.92	15.71	10.14	1.23	37.30	15.99
Kota								
Tangerang	1.250	0.17	4.51	51.63	18.96	4.58	11.80	7.93
Cilegon	2.285	0.22	6.10	37.13	16.17	2.83	22.94	11.95
Serang	5.903	0.63	6.82	24.97	22.28	2.69	24.12	13.85
Tangerang Selatan	827	0.17	3.44	44.44	26.34	6.40	10.72	8.11
Banten	11.86	0.90	4.99	27.78	18.93	3.01	21.32	11.21

Sumber: BKKBN Provinsi Banten, 2018

Keberhasilan pembangunan keluarga juga sangat dipengaruhi pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan.

Berdasarkan tabel 3.8, menunjukkan bahwa capaian indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Tangerang selama tiga tahun berturut-turut mengalami kenaikan (2018-2020). Meskipun demikian, kenaikan capaian IPG Kabupaten Tangerang masih dibawah target indikator kinerja utama Renstra Kementerian PPA di tahun 2019 yang menargetkan sebesar 92.00.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk di bidang pembangunan keluarga yang lebih baik lagi maka diperlukan suatu strategi seperti meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; meningkatkan ketersediaan pangan yang didukung oleh infrastuktur yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur, dan meningkatkan kemandirian pangan dalam keluarga dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

#### 3.1.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Salah satu tantangan pembangunan kependudukan yang perlu memperoleh perhatian serius adalah persebaran penduduk. Hal ini perlu memperoleh perhatian karena masalah persebaran penduduk tidak hanya masalah kependudukan, tetapi terkait dengan pembangunan pada umumnya. Dari sisi pembangunan ekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah.

Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk. Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Daerah padat penduduk merupakan daerah yang secara ekonomi maju, sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan ekologi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Tabel 3.10 merupakan tabel yang menyajikan jumlah penduduk yang melakukan perpindahan baik datang ataupun keluar Kabupaten Tangerang per Bulan, dengan lingkup perpindahan antar kota atau antar kabupaten.

Tabel 3.10. Pindah Datang dan Pindah Keluar Penduduk Kabupaten

Tangerang 2020

NO	BULAN	JUMLAH WARGA PINDAH DATANG			JUMLAH WARGA PINDAH KELUAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	JANUARI	1,456	1,489	2,979	1303	1255	2547
2	FEBRUARI	1,150	1,145	3,084	1178	1059	2237
3	MARET	959	1,066	3,076	915	866	1791
4	APRIL	273	275	2,573	415	357	778
5	MEI	420	366	2,239	244	220	464
6	JUNI	1,093	1,183	2,423	893	897	1799
7	JULI	929	925	4,446	579	581	1159
8	AGUSTUS	1,120	1,071	3,299	375	366	731
9	SEPTEMBER	1,569	1,529	3,107	441	477	918
10	OKTOBER	1,084	1,142	3,350	523	495	1006
11	NOVEMBER	1,456	1,489	2,667	531	508	1039
12	DESEMBER	1,054	1,078	2,132	328	256	584
<b>JUMLAH TAHUN 2020</b>		<b>12,563</b>	<b>12,758</b>	<b>35,375</b>	<b>7,725</b>	<b>7,337</b>	<b>15,053</b>

Sumber : Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang, 2020

Dari tabel 3.10 dapat dianalisa bahwa jumlah warga yang pindah datang ke Kabupaten Tangerang masih tinggi. Ini terlihat dari prosentase jumlah warga yang pindah datang dibanding jumlah warga yang pindah keluar prosentasenya mencapai 40%. Dilihat dari gender, baik laki-laki atau perempuan menyumbang prosentase hampir sama besarnya. Jumlah laki-laki yang pindah keluar dengan jumlah laki-laki yang pindah datang memiliki perubahan prosentase 40%. Tidak berbeda, jumlah perempuan yang pindah keluar (7.737 perempuan) juga memiliki perubahan prosentase yang hampir sama banyaknya dengan jumlah perempuan pindah datang (12.758 perempuan) sebesar 40%. Untuk menekan laju migrasi yang terjadi, maka Pemerintah kabupaten Tangerang harus mendata warga yang data berasal terbesar dari daerah mana, kemudian Pemerintah Kabupaten Tangerang berkoordinasi dengan daerah tersebut baik dalam program atau anggaran untuk bisa menekan laju pindah datang yang besar.

### 3.1.5. Hasil Proyeksi Migrasi

Perpindahan atau migrasi merupakan komponen yang dianggap memiliki peran kecil dalam memengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Namun proyeksi ini tetap memperhitungkan migrasi internasional sebagai salah satu komponen data. Asumsi yang digunakan adalah pola migrasi internasional tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Penghitungan proyeksi migrasi menggunakan rumus :

$$ASNMR_i = Mig-In_i - Mig-Out_i / (5 \times P_{i, mid\ 2010-2015})$$

Dimana :

Mig-Ini = Migrasi masuk di provinsi i

Mig-Outi = Migrasi keluar di provinsi i

Pi mid 2017-2035 = Penduduk pertengahan tahun 2017-2035

Hasil proyeksi migrasi yang dilakukan menunjukkan angka migrasi yang positif yakni sebesar 0.0011. Artinya menandakan bahwa penduduk baik laki-laki atau perempuan lebih banyak yang masuk ke Kabupaten Tangerang ketimbang keluar Kabupaten Tangerang.

#### 1.3.5. Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil).

Dokumen Kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan.

##### 1.3.5.1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten Tangerang

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan Data DKB Tahun 2020, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Tangerang berusia 0-18 Tahun adalah sebesar 84.31%. Daerah Kecamatan Balaraja dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar yaitu 90.10%, sedangkan Kecamatan Kronjo dengan persentase kepemilikan akte kelahiran terkecil yaitu 67.91%.



Tabel 3.11 Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Penduduk Kabupaten Tangerang

KECAMATAN	Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran (<= 4 TAHUN)			Bayi yang Belum Memiliki Akta Kelahiran (<= 4 TAHUN)			Bayi yang memiliki akta Kelahiran pada tahun kelahiran (< 1 TAHUN)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01-BALARAJA	6.830	7.672	7.781	883	887	1.172	782	862	752
02-JAYANTI	3.287	3.799	3.897	640	724	1.085	268	399	384
03-TIGARAKSA	8.295	10.104	10.330	1.684	1.395	2.102	1.023	1.081	999
04-JAMBE	2.467	3.218	3.504	611	625	878	197	349	396
05-CISOKA	3.867	5.157	5.315	1.347	911	1.320	400	528	446
06-KRESEK	2.760	3.994	4.116	1.262	826	1.331	250	364	378
07-KRONJO	1.888	2.950	3.118	1.542	1.014	1.694	204	268	286
08-MAUK	4.102	5.277	5.344	1.524	1.016	1.795	399	454	490
09-KEMIRI	2.352	2.894	2.928	593	676	1.105	171	244	218
10-SUKADIRI	3.627	4.253	4.317	626	666	1.090	379	450	426
11-RAJEG	6.853	9.488	10.152	2.687	2.046	3.300	657	993	1.007
12-PASAR KEMIS	12.452	14.367	14.961	2.645	1.755	2.017	1.296	1.729	1.699
13-TELUKNAGA	5.895	7.749	8.729	2.116	2.210	3.311	482	703	764
14-KOSAMBI	5.275	5.871	6.243	829	835	1.240	491	653	611
15-PAKUHAJI	4.678	6.284	6.750	1.824	1.597	2.281	456	549	556
16-SEPATAN	5.092	6.129	6.473	1.376	1.400	2.097	500	578	596
17-CURUG	8.475	10.585	10.554	2.299	1.625	1.929	912	1.075	941
18-CIKUPA	12.038	13.951	14.137	2.109	1.552	1.802	1.462	1.683	1.433
19-PANONGAN	6.384	7.559	8.021	1.176	1.256	1.542	667	855	821
20-LEGOK	6.045	7.422	7.527	1.529	1.331	1.936	573	656	639
22-PAGEDANGAN	4.424	5.574	5.694	1.138	988	1.478	466	571	483
23-CISAUK	3.839	4.988	5.384	1.235	893	1.000	427	588	535
27-SUKAMULYA	3.135	4.058	4.282	997	710	1.130	348	442	413
28-KELAPA DUA	7.054	8.918	8.917	1.720	1.059	1.479	968	1.112	749
29-SINDANG JAYA	4.863	5.761	5.991	957	1.035	1.494	432	556	589
30-SEPATAN TIMUR	4.480	5.625	5.990	1.307	1.299	2.150	450	528	531
31-SOLEAR	3.819	4.917	5.303	927	1.057	1.647	368	520	541
32-GUNUNG KALER	1.752	2.452	2.623	791	812	1.239	121	205	195
33-MEKAR BARU	1.244	1.987	2.136	839	750	1.241	164	157	172
JUMLAH	147.272	183.003	190.517	39.213	32.950	47.885	15.313	19.152	18.050

Sumber : Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

#### 1.3.5.2. Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

KTP Elektronik (KTP-El) merupakan dokumen penting sebagai identitas penduduk Kabupaten Tangerang yang

berusia 17 Tahun atau lebih. Berdasarkan Tabel 2.12, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang sudah rekam menyentuh angka 95.66%. Dengan Kecamatan Terkecil Rasio Perekaman KTP-EI adalah Kecamatan Cisauk dengan persentase 94.88% (Jumlah Penduduk yang belum rekam KTP sebanyak 3,045 Jiwa atau 5.12% dari seluruh penduduk wajib KTP) dan dengan persentase terbesar adalah Kecamatan Sukadiri dengan persentase 96.63%.

Tabel 3.12 Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tangerang

KECAMATAN	KEPEMILIKAN								
	YANG WAJIB MEMILIKI E-KTP			YANG MEMILIKI E-KTP			YANG BELUM MEMILIKI E-KTP		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01-BALARAJA	79.073	83.678	85.309	71.741	74.351	75.873	7.332	9.327	9.436
02-JAYANTI	43.348	46.151	47.217	40.044	41.418	41.859	3.304	4.733	5.358
03-TIGARAKSA	95.544	103.109	107.377	83.988	88.533	92.684	11.556	14.576	14.693
04-JAMBE	31.542	34.089	35.047	28.985	30.351	31.342	2.557	3.738	3.705
05-CISOKA	55.504	59.954	62.232	49.296	51.580	53.581	6.208	8.374	8.651
06-KRESEK	44.738	47.984	48.716	40.189	41.945	42.949	4.549	6.039	5.767
07-KRONJO	39.083	42.289	43.606	33.813	35.578	37.115	5.270	6.711	6.491
08-MAUK	58.418	61.365	61.737	53.698	55.195	55.525	4.720	6.170	6.212
09-KEMIRI	30.388	33.050	33.709	27.570	28.877	29.597	2.818	4.173	4.112
10-SUKADIRI	41.526	44.364	44.791	37.483	38.931	39.827	4.043	5.433	4.964
11-RAJEG	100.194	109.069	115.967	88.986	93.010	98.367	11.208	16.059	17.600
12-PASAR KEMIS	172.094	182.609	186.017	153.810	158.196	163.675	18.284	24.413	22.342
13-TELUKNAGA	95.836	107.012	112.522	86.792	93.546	97.509	9.044	13.466	15.013
14-KOSAMBI	76.552	77.961	79.755	68.806	68.070	69.597	7.746	9.891	10.158
15-PAKUHAJI	76.017	82.164	85.087	68.169	70.895	74.144	7.848	11.269	10.943
16-SEPATAN	66.517	72.215	74.785	59.989	62.582	65.348	6.528	9.633	9.437
17-CURUG	112.266	119.565	123.164	98.225	102.164	106.029	14.041	17.401	17.135
18-CIKUPA	136.621	144.676	147.275	123.918	129.215	132.697	12.703	15.461	14.578
19-PANONGAN	74.435	80.852	84.315	67.658	71.010	74.852	6.777	9.842	9.463
20-LEGOK	72.572	79.128	81.855	65.413	69.075	71.671	7.159	10.05	10.184

								3	
22-PAGEDANGAN	63.532	69.335	72.252	57.267	60.367	62.436	6.265	8.968	9.816
23-CISAUK	52.458	56.968	59.454	46.458	48.439	51.204	6.000	8.529	8.250
27-SUKAMULYA	45.458	48.226	49.701	42.236	43.686	45.074	3.222	4.540	4.627
28-KELAPA DUA	114.877	122.178	124.266	103.211	106.950	108.950	11.666	15.228	15.316
29-SINDANG JAYA	56.182	60.883	62.529	50.414	53.026	54.880	5.768	7.857	7.649
30-SEPATAN TIMUR	62.299	67.875	70.661	56.895	59.613	61.495	5.404	8.262	9.166
31-SOLEAR	55.543	60.990	63.981	49.830	52.523	55.347	5.713	8.467	8.634
32-GUNUNG KALER	33.110	36.184	37.306	30.013	31.625	32.595	3.097	4.559	4.711
33-MEKAR BARU	24.853	28.105	29.192	22.770	24.704	25.330	2.083	3.401	3.862
JUMLAH	2.010.580	2.162.028	2.229.825	1.807.667	1.885.455	1.951.552	202.913	276.573	278.273

Sumber : Statistik Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

### 3.2. Kondisi Kependudukan Ideal yang Diinginkan

Dengan merujuk pada 5 pilar GDPK yang ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Tangerang paling tidak harus melibatkan lima pilar, ditambah dengan adanya pengembangan pada target capaian yang ditetapkan dalam SDGs.

#### 3.2.1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan pada 2025.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, TFR mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2025. Akan tetapi target tersebut berbeda dengan perkiraan yang dilakukan oleh PBB. Seperti halnya RPJMN 2020-2024, diperkirakan TFR sama dengan 2,1 akan tercapai pada periode 2025-2030 tetapi pada periode berikutnya penurunan TFR akan melambat yaitu mencapai 2,096 pada periode 2025-2030 dan 1,990 pada periode 2030-2035. Oleh United Nation (UN) angka

ini dibuat konstan sampai dengan tahun 2050. Hasil proyeksi penduduk (sementara) yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa TFR sama dengan 2,1 juga lebih lambat dibandingkan target RPJMN 2020-2024. Selanjutnya posisi TFR Provinsi Banten di atas nasional yaitu sebesar 2,3 anak per wanita. Namun demikian, masih terdapat disparitas antara daerah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan hasil Kajian Pemetaan Perkembangan Penduduk Provinsi Banten (Utari, E dan Riny Handayani, 2020) tersaji pada tabel 3.13 :

Tabel 3.13. Angka Kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) Tahun 2020

Kelas	Angka Kelahiran ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	Kabupaten/ Kota
I	1,96 – 2,21	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang
II	2,22 – 2,47	Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak
III	2,48 – 2,73	Kabupaten Serang
IV	≥ 2,74	Kabupaten Pandeglang

Tabel 3.13 membagi TFR menjadi 4 kelas yaitu kelas 1 dengan TFR 1,96- 2,21 meliputi wilayah Tangerang Raya. Kelas 2 dengan TFR 2,22 – 2,47 meliputi wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Sementara kelas 3 dengan TFR 2,48 – 2,73 ada di Kabupaten Serang, dan hanya Kabupaten Pandeglang yang berhasil memperoleh TFR tertinggi, dengan perolehan TFR ≥ 2,74. Lebih lanjut, dapat dianalisa bahwa Kabupaten Tangerang berhasil menekan laju kelahiran dengan perolehan TFR berkisar 1,96-2,21. Namun demikian, batas atas angka tersebut masih di atas target TFR Nasional yaitu 2,1. Untuk itu program pengendalian penduduk masih harus terus ditingkatkan agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan.

Tidak hanya TFR, angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) juga menjadi indikator pengelolaan kuantitas penduduk. ASFR menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur antara 15-49 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Tabel 3.14. Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-49 tahun, Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

Kelas	Angka Kelahiran Menurut Umur ( <i>Age Spesific Fertility Rate/ASFR</i> ) 15-19 tahun	Kabupaten Kota
I	12,97 – 21,86	Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
II	21,87 – 30,76	Kabupaten Lebak, Kota Cilegon
III	30,77 – 39,66	Kabupaten Tangerang, Kota Serang
IV	≥ 39,67	Kabupaten Pandeglang

Parameter ASFR 15-19 tahun mendapat perhatian khusus karena di kelompok umur ini menjadi proksi prevalensi pernikahan dini di usia remaja yang memicu tingginya kehamilan di usia remaja kurang dari 20 tahun yang beresiko terhadap angka kematian ibu/maternal. Dari tabel 3.3 dapat dianalisa bahwa Kabupaten Tangerang dan Kota Serang masuk dalam kelas III. Artinya Kabupaten Tangerang dan Kota Serang merupakan wilayah wilayah yang cukup tinggi dalam kehamilan di usia remaja yakni pada kelompok umur 15-19 tahun. Sementara, Kabupaten Pandeglang menempati kelas IV yang berarti angka kehamilan di usia remaja di Kabupaten Pandeglang sangat tinggi. Dengan demikian permasalahan pernikahan usia remaja cukup menjadi key point permasalahan yang wajib diselesaikan dengan baik di ketiga wilayah tersebut jika ingin bisa mengendalikan angka kelahiran.

Secara nasional skenario paling optimis TFR sama dengan 2,1 akan tercapai pada periode 2025-2030. Kondisi inilah yang ingin dicapai, sebab jika memperhatikan dua skenario lainnya, pencapaian TFR sama dengan 2,1 terjadi pada periode yang lebih lambat dan akan memiliki implikasi terhadap perubahan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

Lebih lanjut, secara nasional angka kematian bayi pada tahun 2020 mencapai 24/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan target program, angka kematian bayi tahun 2024 diharapkan akan menjadi 16.8 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2035 menjadi sekitar 12.3 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk Kabupaten Tangerang, jumlah kematian bayi menurun sejak tahun 2017 sebesar 285, menjadi 247 pada tahun 2018 dan terus menurun pada tahun 2019 sebesar 228 (tabel 3.15).

Tabel 3.15. Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	2018	2019	2020	2021
	247	227	203	158

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2021

Tabel 3.15 menunjukkan jumlah kematian bayi di Kabupaten Tangerang terus menurun dari tahun 2018. Penyebabnya antara lain karena meningkatnya jumlah puskesmas mampu PONEB dan juga karena meningkatnya keterampilan tenaga kesehatan terutama petugas puskesmas dalam tata laksana kasus kegawatdaruratan pada bayi. Penyebab terbanyak kematian bayi pada tahun 2019 adalah asfiksia, dan urutan kedua adalah *Berat badan lahir rendah (BBLR)*. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2018 yang menempatkan BBLR sebagai penyebab kasus kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran ibu-ibu hamil yang mengikuti anjuran untuk memeriksakan kehamilannya secara berkala. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup (UHH) untuk Kabupaten Tangerang sebesar 69,89. Angka tersebut masih jauh dibawah nasional yang juga meningkat dari 71,47 tahun 2020 menjadi 74,9 tahun pada 2035.

Berdasarkan pencapaian TFR dan perkiraan Angka Kematian Bayi/*Infant Mortality Rate (IMR)* serta UHH yang didasarkan pada target program, maka tahun 2025 jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 284,8 juta, dan tahun 2035 diperkirakan menjadi 305,6 juta, dengan syarat kondisi yang harus dipenuhi adalah pertumbuhan penduduk per tahun dapat ditekan menjadi 1,35 persen pada periode 2010-2015; 1,19 persen pada periode 2015-2020; 1,03 persen pada periode 2020-2025; 0,89 persen pada periode 2025-2030 dan 0,75 persen pada periode 2030-2035. Di samping itu, dari sisi perubahan komposisi penduduk menurut umur, tahun 2027 diharapkan Indonesia berada pada fase rasio ketergantungan mencapai angka terendah, yaitu kurang dari 44,8.

Pencapaian ini mirip dengan hasil perhitungan UN, meskipun dengan rasio ketergantungan yang lebih tinggi. Kondisi ini penting karena akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mencapai bonus demografi. Salah satu tandanya adalah dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai puncak, yaitu kira-kira 70 persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan agar sejak sekarang dapat disusun kebijakan untuk optimalisasi kesempatan tersebut. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat seperti halnya indikasi yang muncul dari berbagai sumber data, maka

tahap tersebut akan tertunda atau bahkan hilang sama sekali.

### 3.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk dijabarkan sebagai kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Kondisi ideal yang diinginkan dari pengembangan kualitas penduduk adalah terwujudnya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Dari sisi pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen.

Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), persentase harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Indikator tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Secara Nasional, APM SD mencapai 100 persen dari 94,0 persen pada tahun 2008, meskipun sebenarnya pencapaian target tersebut dapat dilakukan pada periode sebelumnya melalui program wajib belajar. Di tingkat nasional, APM untuk tingkat SLP mencapai 80,12 di tahun 2020. Pencapaian ini cukup realistis dengan memerhatikan tren selama 30 tahun terakhir yang memperlihatkan kenaikan cukup impresif. Dan APM pada tingkat SLA mencapai hampir 61,25 persen.

Lebih lanjut, untuk APM tingkat SD/MI di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sudah mencapai 98,87 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Tangerang ada sekitar 98 anak diantaranya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/Sederajat. Sementara, untuk tingkat

SMP/MTs sebesar 81,62 persen, dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 54,94 persen, maka pencapaian yang ditargetkan 70-80 persen tahun 2035 adalah masuk akal.

APM dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan SDGs dalam mengukur pencapaian kualitas pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya.

Dengan kondisi bahwa APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Tangerang baru mencapai 54,94 persen, maka kondisi ideal yang diinginkan adalah perolehan akses untuk menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat bagi penduduk remaja Kabupaten Tangerang secara merata. Faktor pendidikan merupakan keypoint dari pengukuran maju tidaknya sebuah daerah. Semakin banyak penduduk Kabupaten Tangerang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki dampak pada pembangunan daerahnya. Sehingga target APM mencapai 70-80 persen di tahun 2035 bisa tercapai.

### 3.2.3. Pembangunan Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang meliputi:

- 1) Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- 2) Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- 3) Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu.
  - Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
  - Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
  - Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
  - Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.



#### 3.2.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah di Kabupaten Tangerang sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di beberapa kecamatan yang memang sangat padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk didaerah tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya. Namun patut disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah dengan kategori urban semakin banyak jumlahnya karena fasilitas dan hasil pembangunan yang merata.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Ini berarti pemerintah harus dapat menata keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dari segi Mobilitas, kondisi yang diinginkan adalah mendorong urbanisasi dari kota/kabupaten padat penduduk di Kabupaten Tangerang melalui perubahan konsentrasi pusat pelayanan publik. Perubahan tersebut dilakukan dengan mendorong mengalirnya penduduk dari satu kecamatan ke kecamatan yang masih jarang penduduknya. Selain itu distribusi pusat pelayanan publik diubah dan wilayah perdesaan menjadi pusat perekonomian.

#### 3.2.5. Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan kementerian terkait dan pihak swasta yang membutuhkan.
- 2) Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Enam kategori isu-isu strategis : Regulasi dan Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saling terkait satu sama lain.

Demikian pula untuk prioritas pemecahan masalah dari setiap isu-isu strategis tersebut. Regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kependudukan telah ada, tetapi masih perlu penjelasan yang lebih rinci, terutama untuk operasionalisasi regulasi dan kebijakan di daerah-daerah. Operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan enforcement dan pemberian sanksi bagi yang melanggar regulasi dan kebijakan.

Di samping itu, regulasi dan kebijakan perlu secara sistematis disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan data kependudukan. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan cara menerjemahkan regulasi dan kebijakan kedalam bentuk-bentuk yang lebih operasional dan pembuatan alur kerja (*work flow*) tertib administrasi kependudukan. Pembuatan operasionalisasi alur kerja ini akan menjamin standardisasi pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Regulasi dan perundang-undangan serta standardisasi ini tidak akan dapat berjalan secara optimal jika sekiranya tidak didukung oleh kelembagaan yang baik. Kelembagaan di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tertata dengan baik. Semua fungsi SAK dan SIAK telah terbagi ke dalam unit-unit yang ada. Setiap unit memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terdefiniskan dengan jelas. Beberapa unit masih perlu menyinkronkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tupoksinya. Disamping itu, perlu ditetapkan indikator kinerja setiap unit agar irama kerja sama antar unit dapat menghasilkan produk layanan yang optimal.

Sementara itu, kelembagaan yang menangani SAK dan SIAK di daerah masih bervariasi. Ada daerah yang secara jelas dan tegas menetapkan Dinas Kependudukan untuk menangani SAK dan SIAK, tetapi masih ada daerah yang menetapkan penanganan SAK dan SIAK di bawah dinas yang lain walaupun jumlah hanya satu, dua daerah saja. Untuk itu, perlu adanya standardisasi struktur organisasi penanganan SAK di daerah.

Struktur organisasi yang menangani SAK dan SIAK, baik yang di pusat maupun yang di daerah, tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK seyogianya disusun berdasarkan hierarki kelembagaan yang mengelola SAK dan SIAK tersebut. Setiap tingkatan pada hierarki tersebut memerlukan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditetapkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya pada setiap unit. SDM ini secara terus-menerus perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik pengetahuan maupun keterampilannya dalam menangani SAK dan SIAK.

Pelatihan untuk SDM ini perlu dilakukan secara berkala, terjadwal, dan berkelanjutan. Terutama untuk SDM TIK yang telah dilatih, mereka tidak boleh dimutasikan ke bidang non-TIK, tetapi perlu disediakan jenjang karier yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar SDM TIK tetap dapat merespon perubahan-perubahan infrastruktur TIK yang sangat pesat. Aplikasi SIAK itu tersendiri terdiri dari dua modul utama, yaitu modul pendaftaran penduduk dan modul pencatatan sipil. Setiap modul utama tersebut dibagi lagi atas berbagai submodul yang digunakan, baik di pusat maupun di daerah.

Oleh karena itu, perlu direviu sejauh mana aplikasi SIAK diterapkan, baik di pusat maupun di daerah. Seyogianya, aplikasi SIAK tersebut mengalir mulai dari titik layanan kependudukan (kelurahan atau kecamatan), lanjut ke kabupaten/kota, dan pusat serta ke provinsi. Secara proporsional dan terdistribusi, aliran aplikasi SIAK ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.

Bersamaan dengan aplikasi SIAK, maka database kependudukan dapat dikonsolidasikan secara bertingkat. NIK dan KTP elektronik adalah salah satu informasi identitas dan dokumen kependudukan sebagai keluaran dari aplikasi SIAK yang sangat penting dan berdampak luas. NIK, selain sebagai identitas penduduk Indonesia, juga merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data diri seseorang guna mendukung pelayanan publik.

Ketunggalan NIK secara efektif dimulai sejak diterbitkannya kepada seorang menggunakan SIAK. Pada saat ini untuk menjamin autentitas NIK hanya digunakan dua faktor, yaitu faktor yang menyatakan sesuatu yang Anda ketahui dan faktor yang menyatakan sesuatu yang Anda miliki. Dalam rangka memastikan ketunggalan NIK, dilakukan konsolidasi antar database kabupaten/kota, provinsi, dan nasional secara sistem tersambung (on-line). Pada saat bersamaan, setiap database kependudukan kabupaten/kota dimuktakhirkan untuk membersihkan unsur yang menjadikan NIK ganda, NIK yang tidak merepresentasikan pemiliknya, satu NIK dimiliki oleh dua orang, dan seterusnya dengan mekanisme konsolidasi secara online dan verifikasi 1 : N.

Dalam rangka meningkatkan ketunggalan NIK seseorang, maka seluruh penduduk wajib KTP akan direkam berupa biometri seluruh sidik jari dan disimpan dalam server database sidik jari (AFIS). Sistem database ini terintegrasi database SIAK sehingga seseorang wajib KTP dapat diakses biodata termasuk NIK dan biometri sidik jarinya.

KTP elektronik sebagai KTP ber-chip yang memuat biodata, sidik jari, dan foto penduduk bersangkutan adalah upaya untuk meniadakan kepemilikan KTP palsu dan KTP ganda, serta kurangnya

kepercayaan terhadap KTP bersifat nasional. Untuk itu, secara bertahap akan diterapkan KTP elektronik sesuai amanat Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Infrastruktur TIK untuk mendukung kegiatan SAK dan SIAK akan terus berkembang dan berubah. Sering kali perkembangan dan perubahan TIK ini tidak sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai. Dapat saja pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang tidak berlaku lagi bagi TIK di masa yang akan datang.

Agar terjadi kesinambungan dalam penanganan infrastruktur TIK, maka perlu disusun suatu tata kelola TIK (IT Governance) untuk SAK dan SIAK. Tata kelola TIK ini menjamin TIK yang digunakan untuk SAK dan SIAK memberikan manfaat yang optimal bagi unit-unit yang menangani administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, infrastruktur TIK, seperti server, jaringan internet, dan komputer pribadi, perlu di-upgrade secara berkala dan berkelanjutan. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan outsource pengelolaan infrastruktur TIK agar SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang substantif. Oleh karena itu, perlu dijalin kerjasama antara Ditjen Adminduk dengan penyedia jasa TIK, terutama untuk mendukung kegiatan aplikasi SIAK agar memberikan hasil yang optimal.

#### Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan identifikasi terhadap hasil pencapaian program pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tangerang, maka potensi dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

##### 1) Potensi :

Potensi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, baik menyangkut sumberdaya manusia, sarana prasarana maupun program kependudukan dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) reputasi dan pengalaman dalam menanggulangi masalah gizi melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumber daya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dan Keramas.
- b) dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja.

##### 2) Permasalahan

Di samping keberhasilan yang telah dicapai dalam penanggulangan gizi, masih terdapat beberapa permasalahan yang

harus diselesaikan dalam periode pembangunan masa mendatang. Permasalahan di bawah ini meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB di Kabupaten Tangerang.

Analisis SWOT dari hasil identifikasi terhadap patensi dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Tangerang, maka dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kependudukan di Kabupaten Tangerang selama periode 2010-2035.

Selanjutnya berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki dilakukan analisis sederhana melalui Metoda SWOT.

1) Kekuatan

- a) Kabupaten memiliki fasilitas kesehatan pelayanan primer, transportasi, teknologi informasi dan media, sumberdaya manusia yang profesional;
- b) Ketersediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi untuk menjamin kelangsungan peserta KB;
- c) Tersedianya pedoman tentang strategi operasional dan kebijakan program pengendalian kuantitas kependudukan di Kabupaten Tangerang.

2) Peluang

- a) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
- b) Peraturan Daerah tentang RPJMP Kabupaten Tangerang tahun 2015-2025;
- c) Dukungan anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD dan APBN

3) Kelemahan.

- a) Belum adanya standar jumlah pasangan usia subur yang harus dibina oleh setiap tenaga pengelola program di lini lapangan (Penyuluh KB);
- b) Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana terhadap pemangku kebijakan dan masyarakat belum optimal.

4) Ancaman

- a) Program kependudukan dan keluarga berencana belum menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu upaya sosialisasi dan promosi serta memberikan pemahaman pentingnya program kependudukan dan KB bagi kelangsungan program pembangunan lainnya;
- b) Jumlah keluarga miskin masih cukup tinggi di wilayah

Kabupaten Tangerang;

- c) Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif memerlukan perhatian yang lebih serius dibidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, sehingga tidak menjadi beban pembangunan pemerintah daerah;
- d) Tingkat kesejahteraan masyarakat belum sesuai dengan biaya hidup cukup (BHe).

## BAB IV. VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

### 4.1. Visi dan Misi GDPK

#### Visi

Berdasarkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” dan mengacu pada Perda No 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Tangerang 2019-2023 maka disusunlah visi Grand Desain Kependudukan sebagai berikut:

“Terwujudnya pengendalian, persebaran, dan kesejahteraan penduduk dengan membangun masyarakat Kabupaten Tangerang yang religious, berkualitas dan berdaya saing”

#### Misi

Misi pembangunan Kabupaten Tangerang:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata ruang wilayah

Mengacu pada Misi Kabupaten Tangerang maka disusunlah Misi dari Grand Desain Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religious, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk megembangkan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Tangerang
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam lingkup keluarga dengan memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, tumbuh kembang anak, dan pendampingan lansia.
4. Menekan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam melihat peluang usaha.
5. Menciptakan sistem sarana data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, dan rill sehingga dapat

digunakan serta diakses oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Tangerang.

6. Meningkatkan kerjasama dan komitmen para pemangku kepentingan terkait strategi dalam pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) yang sejalan dengan visi dan misi GDPK Kabupaten Tangerang.

#### 4.2. Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Tangerang berdasarkan 5 pilar yang berkaitan dengan kependudukan yaitu:

##### Pengelolaan Kuantitas Penduduk

- Belum adanya standar jumlah pasangan usia subur yang harus dibina oleh setiap tenaga pengelola program di lini lapangan (Penyuluh KB);
- Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana terhadap pemangku kebijakan dan masyarakat belum optimal.

##### Peningkatan Kualitas Penduduk

- Belum meratanya akses pendidikan khususnya pada tingkat SMA/SMK/MA, karena menurut data BPS rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Tangerang dari 2018-2020 mendapatkan pendidikan hanya sampai jenjang SMP/MTs/Tsanawiyah.
- Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja khususnya pada usia muda atau terdidik, Kesempatan kerja dan pengangguran usia muda atau terdidik, rendahnya kesadaran perusahaan dalam memberikan informasi kesediaan peluang kerja, serta rendahnya minat untuk berwirausaha.
- Belum optimalnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan eks trauma.
- Belum optimalnya pelayanan, sarana dan prasarana panti rehabilitasi
- Pembinaan keterampilan terhadap anak masih belum optimal
- Akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak masih belum maksimal
- Isu pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami hambatan untuk mengekspor karena birokrasi



mendapatkan legalitas masih sangat sulit.

#### Pembangunan Keluarga Berkualitas

- Belum optimalnya aksesibilitas dan mutu pelayanan pada fasilitas pelayanan dasar dan rujukan
- Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih belum maksimal
- Permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi karena kasus stunting yang masih tinggi. Hal ini sejalan dengan data e-PPGBM (Pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat secara elektronik) Dinas Kesehatan bahwa pada tahun 2020 angka prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang masih berada di sekitar 11,60%. Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih. Masih adanya kasus stunting tersebut dapat menimbulkan dampak pada penurunan kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit.
- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan sarana penunjang sesuai standar di fasilitas kesehatan
- Banyaknya peredaran makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan *hygiene* sanitasi disebabkan karena mudahnya masyarakat mendapatkan bahan kimia pengawet dan bahan tambahan makanan berbahaya, serta lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap peredaran bahan tambahan makanan (BTM) berbahaya
- Situasi pandemic berdampak pada keluarga di Kab. Tangerang khususnya keluarga pra- sejahtera yang belum memiliki rumah layak huni (Misalnya di Kecamatan Pakuhaji terdapat 220 Rumah Tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni)
- Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dengan kondisi ideal nasional sebesar 100
- Masih meningkatnya jumlah KDRT di Kabupaten Tangerang
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti perkawinan anak dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, penipuan, cyber crime, dan lain-lain

#### Pengarahannya Mobilitas Penduduk

- Pemukiman kumuh yang masih menjadi permasalahan menahun pada urusan perumahan di Kabupaten Tangerang
- Proporsi TPU terhadap jumlah penduduk masih rendah
- Ketersediaan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang yang terpadu (transportasi cerdas) dan merata ke seluruh wilayah desa. Hal ini terutama yang menghubungkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara sosial ekonomi, pusat-pusat ekonomi, serta wilayah yang memiliki titik-titik kemacetan.

#### Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi

- Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Tangerang belum optimal
- Belum optimalnya *e-government* dimana bertujuan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang dapat meningkatkan kualitas layanan public secara efisien, efektif dan interaktif.
- Belum optimalnya aplikasi atau sistem yang terintegrasi pada OPD
- Isu kepemilikan dokumen kependudukan (cakupan kepemilikan e-KTP, KIA, akte kelahiran dan indeks kepuasan masyarakat) masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan – dan data Kependudukan.

Secara garis besar isu strategis Kabupaten Tangerang terdapat tiga hal yaitu berkaitan dengan ekonomi, administrasi dan aparatur pemerintahan, serta sosial budaya.

##### 1. Ekonomi

Isu strategis pembangunan bidang ekonomi, adalah sebagai berikut:

##### a. Pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau

Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden RI berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi pasca Covid-19 yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh serta tidak mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. Isu pembangunan hijau dan berkelanjutan harus diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya adalah dengan mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon (*low carbon development*). Fokus pembangunan sudah selayaknya diubah mengarah mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan rendah karbon telah diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dalam salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan membangun

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

b. Pemberdayaan IKM dan UMKM

Permasalahan pada isu ini adalah terdapat pada kurangnya fasilitas modal untuk UMKM dan IKM. Khusus untuk UMKM, permodalan dapat difasilitasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi. Akan tetapi, kurangnya koordinasi antara dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Tangerang dengan LPDB membuat penyaluran dana modal tidak maksimal. Sementara itu untuk permodalan IKM masih terhambat oleh promosi investasi yang belum optimal. Hal ini dikarenakan informasi potensi dan peluang investasi yang diberikan kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. Permasalahan lainnya dalam isu pemberdayaan IKM dan UMKM adalah masalah legalitas yang menghambat ekspor. Beberapa IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen karena birokrasi untuk mendapatkan legalitas tersebut sangat sulit.

2. Administrasi dan Aparatur Pemerintahan

Isu strategis urusan administrasi dan aparatur di Kabupaten Tangerang dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Tangerang serta pemerataan kualitas aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, bersih, dan berintegritas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi pandemi covid-19.
- b. Revitalisasi reformasi administrasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat peraturan, dan partisipatif.
- c. Peningkatan tata Kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (wajar tanpa pengecualian).
- d. Pengembangan kelembagaan dan regulasi yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta terwujudnya penegakan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- e. Pengembangan smart city untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari-hari sehingga terwujud efisiensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang yang modern.
- f. Pemanfaatan teknologi untuk proses pengadaan barang dan jasa seperti e-Purchasing sehingga terwujud pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.

### 3. Sosial Budaya

Berdasarkan analisis permasalahan utama yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi isu-isu strategis untuk tema sosial budaya, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tangerang. Antara lain adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Hal tersebut menjadi penting karena syarat utama sebuah daerah untuk bersaing dalam era globalisasi adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- b. Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah (kuantitas) SDM di bidang sosial budaya yang dapat menghambat kinerja pelayanan publik, yang salah satunya terjadi di bidang Pendidikan. Dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pendidik dan jumlah SDM yang mengelola manajemen sekolah, maka sering terjadi penugasan ganda bagi para pengajar yang sekaligus menjabat bagian administrasi pengelolaan dana, seperti dana BOS yang menurut ketentuan harus dikelola oleh ASN. Fenomena semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi mutu dan kualitas sektor Pendidikan karena terbaginya fokus pengajar kepada dua tugas yang harus dilaksanakan sekaligus.
- c. Isu pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2020 – 2024. Hal dikarenakan Kabupaten Tangerang telah memasuki tahun bonus demografi. Apabila bonus demografi ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kab. Tangerang mengingat saat ini kondisi kualitas SDM dan kuantitas SDM siap pakai yang tersedia di Kabupaten Tangerang masih membutuhkan banyak peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam poin a dan b.
- d. Terdapat isu di bidang kesehatan, yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
- e. Permasalahan gizi di Kabupaten Tangerang turut menjadi isu strategis yaitu terkait dengan stunting. Hal ini sejalan dengan data e-PPGBM (Pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat

secara elektronik) Dinas Kesehatan bahwa pada tahun 2020 angka prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang masih berada di sekitar 11,60%. Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih. Masih adanya kasus stunting tersebut dapat menimbulkan dampak pada penurunan kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit.

- f. Isu kepemilikan dokumen kependudukan (cakupan kepemilikan e-KTP, KIA, akte kelahiran dan indeks kepuasan masyarakat) masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan – dan data Kependudukan.
- g. Masih terdapatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) yang mengarahkan kabupaten/kota mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Serta untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.
- h. Di bidang pariwisata, belum optimalnya kinerja bidang pariwisata terkait penataan potensial destinasi pariwisata di Kabupaten Tangerang disebabkan beberapa permasalahan yang mempengaruhinya yaitu : (1) masih kurangnya promosi pariwisata; (2) Masih kurangnya sosialisasi tentang kepariwisataan di kabupaten tangerang; (3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan kepariwisataan; (4) Belum optimalnya industri pariwisata/industri kreatif/ekonomi kreatif; (5) Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan; dan (6) Kurangnya pelestarian dan promosi budaya lokal. Kabupaten Tangerang memiliki potensi budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.

- i. Dalam kasus angka kemiskinan, sebenarnya Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan Data Indikator Strategis Kabupaten Tangerang tahun 2013-2019 yang didata oleh BPS secara makro. Persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 193,970. Dari jumlah tersebut pada tahun 2017 turun 5,39%, kemudian pada tahun 2018 turun kembali menjadi 5,18%, dan terakhir ditahun 2019 turun menjadi 5,14% di tahun 2019. Akan tetapi, dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, maka terdapat kemungkinan angka kemiskinan pada tahun 2020 akan meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sementara (masih dalam tahap validasi per Mei 2020) terhadap 1.170 Rumah Tangga (Ruta) di wilayah Kabupaten Tangerang, yang dimulai sejak awal Maret 2020 lalu, data dan penghitungan yang mengacu pada pendapatan sebesar Rp 476 ribu perkapita perbulan. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi putus kerja besar-besaran di Kawasan yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bergantung pada kegiatan industri. Dengan mempertimbangkan kemungkinan peningkatan angka kemiskinan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19, maka pemerintah daerah Kabupaten Tangerang perlu mempersiapkan strategi untuk pengentasan kemiskinan pasca Covid-19.
- j. Isu strategis lainnya adalah belum optimalnya kapasitas lembaga kebudayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa masalah yang antara lain adalah: (1) masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi dalam pengelolaan seni budaya, (2) Sanggar seni yang ada di masyarakat belum dikelola secara optimal, (3) Masih kurangnya pelestarian Event masyarakat adat, dan (4) Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/keompok seni dan budaya).
- k. Permasalahan dalam isu strategis ini juga terkait beberapa hal, antara lain: (1) Pandemi COVID-19 membuat banyak lapangan pekerjaan yang tutup sehingga meningkatkan pengangguran di Kabupaten Tangerang, (2) Panti Dinas sosial masih belum dilengkapi dengan fasilitas perawatan kesehatan dasar, (3) Masih terdapat keluarga pra-sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni (sebagai contoh di Kecamatan Pakuhaji terdapat 220 Rumah Tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni), 4) Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Isu strategis pembangunan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan,

adalah:

- a. Ketersediaan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang yang terpadu (transportasi cerdas) dan merata ke seluruh wilayah desa. Hal ini terutama yang menghubungkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara sosial ekonomi, pusat- pusat ekonomi, serta wilayah yang memiliki titik-titik kemacetan.
- b. Tersedianya infrastruktur yang mendukung kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Terpenuhinya penyediaan sanitasi dan air bersih terutama pada wilayah kumuh dan miskin.
- d. Terpenuhinya infrastruktur yang mendukung pasokan listrik pada seluruh wilayah kabupaten hingga wilayah perdesaan.
- e. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang mendukung peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta kota cerdas (*smart city*).

## BAB V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dan dipertegas oleh arah kebijakan. Kebijakan pembangunan kependudukan harus menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utamanya dengan mendasarkan penduduk sebagai sentral pembangunan agar dapat mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan kependudukan harus dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat. Sejak tahap perumusan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi kebijakan kependudukan harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Berikut ini adalah arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Tangerang tahun 2022-2046.

### 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang), artinya jumlah bayi yang lahir diharapkan sama/seimbang dengan jumlah kematian. Target Pemerintah Pusat untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) sebesar 2.1 per perempuan pada tahun 2020, 2.04 pada tahun 2025, 1.99 tahun 2030, dan 1.97 tahun 2035. TFR dapat menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh pada wanita usia 15-49 tahun dan dapat dijadikan indikator keberhasilan program KB. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

#### a. Pengaturan Fertilitas

*Total Fertility Rate* (TFR) di Indonesia mengalami penurunan dari 5.6 pada tahun 1971 menjadi 2.6 anak per perempuan di tahun 2012. Kabupaten Tangerang termasuk dalam kategori TFR 1.96-2.21. Berbagai literatur sepakat bahwa hal yang berperan dalam transisi fertilitas di Indonesia adalah keberhasilan program KB dan meningkatnya pendidikan perempuan. Berdasarkan data tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang sebesar 1.26.

Pengaturan fertilitas dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB), dengan mengatur usia ideal perkawinan dan melahirkan dan jarak ideal melahirkan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal



umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Kenaikan batas umur perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun bertujuan untuk mengurangi laju kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Kebijakan pengaturan fertilitas dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam upaya:

1. Peningkatan kualitas pelayanan, advokasi, dan KIE keluarga berencana
  2. Peningkatan capaian peserta aktif KB dan penurunan angka *unmetneed* melalui berbagai pendekatan
  3. Peningkatan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk peningkatan pelayanan dan capaian kesertaan
  4. Peningkatan pelayanan KB untuk jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  5. Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor
- b. Penurunan Mortalitas

Tingkat mortalitas dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu ditopang oleh penurunan angka kematian, di antaranya angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian ibu pasca melahirkan, dan angka kematian bayi dan anak.

Angka kematian ibu tahun 2018 di Kabupaten Tangerang sebanyak 44 per 100.000 kelahiran hidup dengan penyebab terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan (*eclampsia*). Berikutnya, angka kematian bayi pada tahun 2018 adalah 247 per 1000 kelahiran hidup dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) sebagai penyebab terbanyak, yaitu 122 kasus. Kondisi BBLR dapat dipengaruhi oleh status gizi ibu yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia pada masa kehamilan, serta hipertensi.

Bappenas (2016) menjabarkan strategi dan usaha untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, di antaranya adalah meningkatkan kebersihan (*hygiene*) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemia, serta promosi

pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan. Dengan demikian, strategi untuk pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan dengan:

1. Mengembangkan Program Kampung KB
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan KB
3. Memfokuskan Program KB untuk masyarakat miskin dengan memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB
4. Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam program KB dan menjaga kesehatan ibu dan anak
5. Melibatkan keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KB dan peningkatan derajat kesehatan.
6. Memperkuat kelembagaan, komitmen politik, infrastruktur, dan mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan *mutual benefits*.

## 2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal, yaitu pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Arah kebijakan Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kualitas penduduk, yaitu meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan, pendidikan, serta pembangunan yang responsif gender.

### a. Dimensi Kesehatan

Usia harapan hidup di Kabupaten Tangerang terus meningkat

dari tahun 2018-2020, yaitu 69.61 tahun; 69.79 tahun; dan 69.89 tahun; berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin mambaik. Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit kronis dan degeneratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan *treatment* dari penyakit tersebut. Selain usia harapan hidup, indikator dimensi kesehatan kualitas penduduk juga ditentukan oleh angka kematian bayi dan ibu seperti pada pilar pengendalian kuantitas penduduk.

Strategi peningkatan kualitas penduduk dalam hal kesehatan ibu dan anak, antara lain

- a. Penyediaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas
- b. Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader).
- c. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih
- d. Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4)
- e. Pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang
- f. Pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan
- g. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita
- h. Peningkatan peran posyandu dan keterampilan kader dalam rangka peningkatankesehatan ibu dan anak
- i. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6-24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK;
- j. Pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama (1000 HPK)
- k. Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait kesehatan ibu dan anak
- l. Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader)
- m. Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayidan balita.
- n. Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah

Strategi peningkatan kualitas penduduk dalam perbaikan status gizi masyarakat, dengan:

- a. Meningkatkan survailans pangan dan gizi
  - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang
  - c. Kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi
  - d. Fortifikasi
  - e. Penanggulangan gizi darurat
  - f. Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi
- Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan

terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizimasyarakat.

Strategi meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, antara lain dengan pemanfaatan SIM RS Rujukan *Online*
  - b. peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan
  - c. peningkatan upaya penerapan paradigma sehat
  - d. peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan
  - e. pembudayaan/pemassalan olah raga
- b. Dimensi Pendidikan

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainya *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EI belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segi kualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi di setiap koridor. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan tersebut.

Angka melek huruf di Kabupaten Tangerang sudah cukup tinggi, yaitu 95.89 tahun 2017; 97.38 tahun 2018; dan 97.62 tahun 2019 dengan target utama 100%. Pengembangan pendidikan nonformal dan informal bagi masyarakat yang lebih luas dapat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan hidup, dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan formal berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada di atas 90%, sedangkan SMA dan perguruan tinggi masih tergolong rendah meski terjadi peningkatan setiap tahunnya. Selain APS, gender gap dapat dijadikan prioritas untuk mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Strategi perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui:

- a. Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan program sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus
  - b. Pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*
  - c. Pengembangan *learning culture*
  - d. Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional
  - e. Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan dengan mendorong pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan dan *vocation boarding school*
  - f. Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kependidikan
  - g. Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan
  - h. Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan
  - i. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan
  - j. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan
  - k. Peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi
  - l. Peningkatan literasi masyarakat terutama anak usia sekolah
  - m. Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah
- c. Dimensi Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)* dan juga *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*, maka yang tertuang dalam *master plan* tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi.

Strategi pembangunan ekonomi, antara lain:

- a. Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi perdesaan
- b. Penguatan ekonomi regional melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan di wilayah strategis
- c. Menyediakan sarana informasi dan fasilitas pemasaran dalam rangka pengembangan produk-produk unggulan daerah
- d. Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kemudahan birokrasi dan jaminan berinvestasi

e. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan, dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha berbasis ekonomi kerakyatan

f. Menciptakan ketahanan pangan melalui ketersediaan akses pangan masyarakat yang berkualitas dan beragam.

Selain dalam hal pembangunan *ekonomi*, strategi ekonomi juga dipersiapkan untuk tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui:

a. Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi)

b. Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi

c. Memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya

d. Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung

*demand* tenaga kerja ke depan

e. Mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha muda

f. Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru

g. Mengembangkan budaya inovatif

h. Mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal

Strategi di tiga dimensi yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun karena ketertinggalan Indonesia dalam hal IPM dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya adalah pada bidang pendidikan, maka tampaknya sektor tersebut perlu menjadi prioritas dalam strategi peningkatan IPM. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 menunjukkan IPM yang semakin meningkat dari tahun 2018-2020, yaitu 71.59; 71.93; dan 71.92 yang lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Banten.

### 3. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan ekologi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan data statistik kependudukan Kabupaten Tangerang tahun 2020, jumlah warga yang datang (35.375 orang) lebih banyak dibandingkan yang keluar wilayah (15.053 orang). Pengarahan mobilitas penduduk

bertujuan agar jumlah penduduk merata sesuai dengan daya tampung wilayahnya.

Secara garis besar, wilayah topografi Kabupaten Tangerang terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Dataran pesisir, terletak di bagian utara dengan ketinggian berkisar 0-25 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kesek, Kronjo, Pasar Kemis, dan Sepatan.
2. Dataran rendah dari bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian 25 -85 meter di atas permukaan laut, kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara.

Berdasarkan daerah pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Tangerang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pusat pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa yang berada di bagian barat wilayah. Bagian ini difokuskan sebagai sentra industri, permukiman, dan pusat pemerintahan.
2. Pusat pertumbuhan Teluknaga, berada di wilayah pesisir, mengutamakan industri pariwisata alam dan bahari, industri maritim, perikanan, pertambakan, dan pelabuhan.
3. Pusat pertumbuhan Curug, Kelapa Dua, Legok, dan Pagedangan, berada di bagian timur dekat perbatasan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah ini difokuskan sebagai pusat permukiman dan kawasan bisnis.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Tangerang adalah Kecamatan Pasar Kemis (9,614.81 jiwa/km<sup>2</sup>), sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Kronjo (1,340.85 jiwa/km<sup>2</sup>). Wilayah yang padat penduduk merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Tangerang, sedangkan wilayah utara lebih sedikit jumlahnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh daya tarik lebih tinggi pada wilayah yang berbatasan dengan dengan kota dibandingkan dengan yang jauh dari kota.

Pengarahannya mobilitas penduduk dapat tercapai dengan menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Meningkatkan daya saing dan kualitas lingkungan wilayah baru untuk menarik minat masyarakat.
  - b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
  - c. Memperluas kesempatan kerja produktif
  - d. Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional
  - e. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
  - f. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
  - g. Membuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan migrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
4. Pembangunan Keluarga



Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU Nomor 10/1992).

Pembangunan keluarga yang berdasarkan ketahanan keluarga meliputi lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga meliputi: landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Ketahanan fisik meliputi kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Ketahanan ekonomi meliputi: tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan Pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Ketahanan sosial psikologi meliputi: keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum. Ketahanan sosial budaya meliputi: kepedulian sosial, keeratan sosial, ketaatan beragama.

Periode tahun 2018 sampai tahun 2020, pola kemiskinan secara umum mengalami peningkatan, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Berdasarkan data terbaru BPS tahun 2020 penduduk miskin di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan sebesar 6.23%. Adapun, garis kemiskinan pada tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari Rp451,325/kapita/bulan pada tahun 2018, kemudian secara bertahap meningkat hingga menjadi Rp520,741/kapita/bulan. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana dua orang atau lebih hidup bersama dengan aturan, emosional dan masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda (Friedman, 1998). Data Disdukcapil Kabupaten Tangerang tahun 2020 menunjukkan sebesar 627.069 orang bekerja sebagai karyawan swasta, namun keluarga pra sejahtera di Kabupaten Tangerang masih cukup banyak. Artinya, pendapatan sebagai karyawan swasta masih belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena jumlah pendapatan dapat bergantung pada jenis pekerjaan masing-masing.



Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu hal yang mencerminkan kualitas penduduk suatu daerah. IPG Kabupaten Tangerang dari tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan dari 90.90 menjadi 90.98 namun masih dibawah IPG Provinsi Banten, yaitu 91.74. Disisi lain, hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Tangerang telah meningkatkan akses partisipasi penduduk baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun daya beli.

Strategi pembangunan keluarga dapat dilakukan dengan:

- a. Membangun keluarga melalui pendidikan etika, moral, agama, dan sosial budaya secara formal maupun informal agar berkarakter baik
- b. Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
- c. Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
- d. Mengakui perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- f. Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
- g. Mengembangkan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan
- h. Membangun wawasan nasional dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- i. Meningkatkan pendampingan manajemen sumber daya keluarga dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

##### 5. Manajemen Data

Kebijakan umum pembangunan *database* kependudukan dilakukan dengan mengembangkan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan Data DKB Tahun 2020, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Tangerang berusia 0-18 Tahun adalah sebesar 84.31%. Daerah Kecamatan Balaraja dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar yaitu 90.10%, sedangkan Kecamatan Kronjo dengan persentase kepemilikan akte kelahiran terkecil yaitu 67.91%.

KTP Elektronik (KTP-EI) merupakan dokumen penting sebagai identitas penduduk Kabupaten Tangerang yang berusia 17 Tahun atau lebih. Berdasarkan Tabel disamping, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang sudah rekam menyentuh angka 95.66%. Dengan Kecamatan Terkecil Rasio Perekaman KTP-EI adalah Kecamatan Cisauk dengan persentase 94.88% (Jumlah Penduduk yang belum rekam KTP sebanyak 3,045 Jiwa atau 5.12% dari seluruh penduduk wajib KTP) dan dengan persentase terbesar adalah Kecamatan Sukadiridengan persentase 96.63%.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Lebih lanjut, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi 'KIA' adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun KIA memiliki manfaat yang sama dengan KTP hanya perbedaannya adalah KIA masih belum disertai chip elektronik. Terhadap anak pemegang KIA diberikan kemudahankemudahan dalam pengurusan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Berdasarkan Data yang bersumber dari DKB Tahun 2020 diperoleh bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak Penduduk Kabupaten Tangerang adalah sebesar 15.91% dengan kepemilikan terbesar berada pada Kecamatan Tigaraksa yaitu sebesar 40.99% dan terkecil berada pada Kecamatan Gunung Kaler yaitu sebesar 1.52%.

Strategi administrasi dan manajemen data dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah dan pelayanan publik secara profesional
- b. Meningkatkan tata tertib administrasi kependudukan
- c. Mengembangkan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi
- d. Mengembangkan sistem data kependudukan dan keluarga terpadu berbasis teknologi informasi

Tabel 5.1 Tujuan, strategi, arah kebijakan dan indikator GDPK Kabupaten Tangerang

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mengendalikan jumlah penduduk melalui pengaturan fertilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur pendewasaan usia perkawinan</li> <li>- Mengatur jarak antar kelahiran</li> <li>- Meningkatkan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan batas minimal usia perkawinan</li> <li>- Pengaturan jarak kelahirandalam keluarga</li> <li>- Peningkatan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju pertumbuhan penduduk (%)</li> <li>- Pendewasaan usia perkawinan (tahun)</li> <li>- TFR (%)</li> <li>- Keikutsertaan KB (%)</li> </ul>
	Mengendalikan jumlah penduduk dengan menurunkan angka mortalitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, dan lansia</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan persalinan</li> <li>- Meningkatkan pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum</li> <li>- Mengoptimalkan pelayanan Puskesmas untuk PONEK dan PONEK untuk rumah sakit</li> <li>- Meningkatkan status gizi remaja putri, wanita usia subur, dan balita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka kematian ibu (per 1000 kelahiran hidup)</li> <li>- Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)</li> <li>- Usia harapan hidup (tahun)</li> </ul>
Peningkatan Kualitas Penduduk	Meningkatkan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kompetensi penduduk</li> <li>- Mengurangi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan</li> <li>- Peningkatan kompetensi penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka Partisipasi Sekolah</li> <li>- Rata-rata lama sekolah (tahun)</li> <li>- Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>- Indeks Pembangunan</li> </ul>

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
		kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin	- Penurunan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin	Gender (IPG)
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	- Meningkatkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	- Mengoptimalkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	- Prevalensi balita kurang gizi (%)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sarana/fasilitas kesehatan yang berkualitas</li> <li>- Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS</li> <li>- Meningkatkan status gizi masyarakat</li> <li>- Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>- Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak</li> <li>- Meningkatkan PHBS masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan tata kelola manajemen dan klinis serta sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan</li> <li>- Meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS</li> <li>- Peningkatan status gizi masyarakat</li> <li>- Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>- Meningkatkan sanitasi total berbasis masyarakat dan kemitraan dengan lintas sektor dan swasta dalam penyehatan lingkungan</li> <li>- Meningkatkan promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan (JKN-KIS)</li> <li>- Persentase tempat tinggal penduduk terhadap akses sanitasi (%)</li> </ul>

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan status ekonomi penduduk</li> <li>- Mengurangi kesenjangan ekonomi</li> <li>- Meningkatkan perlindungan penduduk rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan tingkat pengangguran terbuka</li> <li>- Meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan dan pembinaan produktivitas</li> <li>- Peningkatan perlindungan dan pengawaan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</li> <li>- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</li> <li>- Tingkat kemiskinan</li> <li>- Cakupan kepemilikan jaminan sosial (%)</li> </ul>
Pembangunan Keluarga Berkualitas	- Meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan ketahanan keluarga	- Meningkatkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga</li> <li>- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga pra sejahtera (%)</li> <li>- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja</li> <li>- Meningkatkan perencanaan kehidupan dan pendampingan penduduk usia lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja</li> <li>- Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia</li> </ul>	

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator/Parameter
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	- Mobilitas, migrasi dan pembangunan yang merata	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan wilayah - Mengurangi mobilitas penduduk ke kota	- Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah - Pembatasan mobilitas ke kota	- Laju pertumbuhan penduduk antar daerah (%) - Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik - Pertumbuhan penduduk kota antar daerah
Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Penduduk	- Terwujudnya sistem data kependudukan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi	- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan - Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi - Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan	- Peningkatan ketersediaan data dan informasi kependudukan - Peningkatan sistem pengolahan dan penyajian data kependudukan - Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kependudukan	- Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa e-KTP dan akte kelahiran - Persentase penduduk menguasai akses komputer

## BAB VI . PETA JALAN (*ROADMAP*)

Secara operasional, untuk setiap tahapan 5 (lima) tahunan diperlukan *roadmap* sebagai acuan setiap sektor serta pemerintah daerah dalam penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan secara sistematis dan terencana. Penyusunan *roadmap* kependudukan suatu wilayah perlu memperhatikan berbagai hal, antara lain tantangan dan peluang di masa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor strategis yang muncul, dan program sebagai amanat pembangunan. *Roadmap* ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sehingga kebijakan yang terbentuk dapat saling terintegrasi.

*Roadmap Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang tahun 2022-2046 disusun untuk merincikan capaian dan strategi setiap 5 tahunan untuk 25 tahun ke depan dalam rangka mencapai misi GDPK 2022-2024. *Roadmap* tersebut dideskripsikan dalam Tabel 6.1 berikut.

*Roadmap* (Tabel 6.1) dan target selama 25 tahun ke depan memudahkan pemerintah untuk menyusun program dalam rangka mencapai target pembangunan kependudukan serta mewujudkan visi misi GDPK 2022-2024.



Tabel 6.1 *Roadmap Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tangerang 2022-2046

Periode	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046
Capaian	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi penduduk	Meningkatnya kualitas dan kuantitas (sarana dan prasarana) pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi penduduk secara lebih luas dan merata	Terwujudnya penduduk Kabupaten Tangerang yang religius, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Terwujudnya penduduk Kabupaten Tangerang yang religius, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing yang didukung oleh pemerintahan, sistem pelayanan dan tata kelola yang baik, cepat tanggap dan transparan berbasis <i>online</i> serta terintegrasi	Tercapainya Misi <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kab. Tangerang 2022-2046: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Tangerang.</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam lingkup keluarga dengan memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, tumbuh kembang anak, dan pendampingan lansia.</li> <li>4. Menekan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam melihat peluang usaha</li> <li>5. Menciptakan sistem sarana data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, dan riil sehingga dapat digunakan serta diakses oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Tangerang.</li> <li>6. Meningkatkan kerjasama dan komitmen para pemangku kepentingan terkait strategi dalam pencapaian tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) yang sejalan dengan visi dan misi GDPK Kabupaten Tangerang</li> </ol>
Garis Besar Strategi	Peningkatan kinerja dan pelayanan program di 5 pilar	Perluasan cakupan penerima manfaat program di 5 pilar	Pengembangan/modifikasi program di 5 pilar	Pembentukan sistem dan tata kelola yang mumpuni dalam setiap program yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi penduduk	

Tabel 6.2 Target pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Tangerang 2022-2046

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2022-2046								Target Akhir	KET
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046		
Pegaturan fertilitas										
Jumlah Penduduk				3.498.848	3.724.901	3.965.558	4.221.764	4.494.522	4.494.522	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	3.01	2.43	1.26*	2.24	2.20	2.10	2.00	1.98	1.98	
Usia Perkawinan Wanita (tahun)	19	19	19	19	20	21	21	21	21	
TFR (%)	2.32	2.32	2.21	2.42	2.35	2.30	2.25	2.1	2.1	
Kesertaan KB (%)	-	-	67.4	69.8	72.5	75	80	85	85	
Penurunan mortalitas										
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	3	3	3	3	3	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	58	36	47	55	52	50	48	46	46	Dinas Kesehatan
Usia Harapan Hidup (tahun)	69.61	69.79	69.89	69.99	70.85	73.57	75.85	78.89	78.89	Dinas Kesehatan

\*) Laju pertumbuhan antar sensus

Tabel 6.3 Target peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Tangerang 2022-2046

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2022-2046								Target Akhir	KET
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046		
<b>Pendidikan</b>										
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA	-	-	54.94	56.78	62.76	68.16	70.39	72.35	72.35	Dinas Pendidikan
Lama sekolah (tahun)	8.27	8.28	8.39	9.25	10.68	11.75	12.89	13.12	13.12	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.59	71.93	71.92	72.78	73.53	74.38	75.14	75.97	75.97	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.90	90.97	90.98	90.99	100	100	100	100	100	
<b>Kesehatan</b>										
Prevalensi balita gizi kurang dan buruk (%)	2.84	2.96	4.9*	4	3.75	3.5	3.25	3	3	Dinas Kesehatan
Persentase kepemilikan JKN-KIS (%)	-	-	35.55	38.79	41.28	45.97	48.98	52.87	52.87	
Persentase Kepala uarga yang memiliki akses santasi (%)	76,6	77,9	78,15	85	90	95	100	100	100	
<b>Ekonomi</b>										
Penduduk miskin (%)	5.18	5.14	6.23	5.27	5.02	4.85	4.56	4.21	4.21	Dinas Sosial
Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.7	8.9	13.0	9.6	8.8	8.1	7.4	6.8	6.8	Dinas Sosial
Tingkat Partisipasi Angkatan	-	66.6	65.4	70.2	75.4	81.3	84.8	89.5	89.5	Dinas Ketenagakerjaan

Kerja (%)										
Persentase kepemilikan jaminan sosial (%)	-		33.44	39.79	43.58	49.77	52.98	52.87	52.87	Dinas Sosial / Dinas Kesehatan
Keluarga Pra sejahtera	109.620	109.242	109.242	99.523	95.364	91.215	88.473	85.267	85.267	Dinas Sosial
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	61.54	61.53	61.58	61.63	61.68	61.73	61.78	61.78	DP3A

Tabel 6.4. Target penataan persebaran dan mobilitas kependudukan Kabupaten Tangerang 2022-2046

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2022-2046								Target Akhir	KET
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046		
Laju pertumbuhan penduduk antar daerah (%)	3,01	2,93	2,84	2,73	2,28	2,80	2,10	2,0	2,0	BPS
Pertumbuhan penduduk kota antar daerah	2,26	2,43	9,40	8,72	7,83	5,92	4,35	2,14	2,14	BPS

Tabel 6.5. Target pengembangan manajemen database dan informasi kependudukan Kabupaten Tangerang 2022-2046

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2022-2046								Target Akhir	KET
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046		
Persentase penduduk wajib memiliki e-KTP namun belum memiliki (%)	10.09	12.79	12.48	12.20	10.87	9.48	8.23	7.34	7.34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penduduk memiliki akte kelahiran	-	-	84.31	85.89	88.46	91.75	93.24	95.67	95.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase penduduk akses internet	-	-	58.49	60.67	64.78	68.21	70.43	75.89	75.89	Dinas Komunikasi dan Informatika
------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

## BAB VII. PENUTUP

Penduduk merupakan subjek dalam pembangunan sehingga persoalan kependudukan harus selalu menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan salah satunya dengan memperhatikan pilar kualitas penduduk, kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran mobilitas penduduk serta database dan administrasi kependudukan. Kabupaten Tangerang dengan penduduk yang banyak dan luasan wilayah yang tinggi ternyata masih menjumpai permasalahan-permasalahan kependudukan. Permasalahan yang menjadi strategis diantaranya berupa akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan, cakupan jaminan kesehatan, cakupan bantuan pendidikan, penataan persebaran penduduk serta pencatatan yang masih belum optimal.

Berdasarkan isu tersebut, strategi dan arah kebijakan disusun untuk menjadi landasan perumusan program dan kegiatan pembangunan kependudukan selama 25 tahun ke depan. Dengan demikian, pembangunan kependudukan diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Tangerang.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR